

No. 180 Februari - Maret 2021

# BaKTI**News**

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MENENTUKAN  
MAKNA KERENTANAN  
DI ERA PANDEMI**

**SINERGI KOMUNTO &  
MASYARAKAT ADAT  
UNTUK PELESTARIAN  
LAUT TOMIA**

**ORANG TOBELO  
BENTENG TERAKHIR HUTAN  
HALMAHERA**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



**BaKTI**News  
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id)

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**  
**ZUSANNA GOSAL**  
Editor **VICTORIA NGANTUNG**  
**ITA MASITA IBNU**

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**  
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**  
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

**Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383**

Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id)

Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

## **BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

## **MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online [baktinews.bakti.or.id](http://baktinews.bakti.or.id) untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

# Daftar Isi

BaKTI*News*

Februari - Maret 2021

No. 180

- 1** Menentukan Makna Kerentanan di Era Pandemi  
Oleh **PUSKAPA UI**
  - 6** Pascapandemi COVID-19, Bisakah Pandangan Manusia Terhadap Bumi Berubah?  
Oleh **ARYANTO HUSAIN**
  - 9** Riset: Baik di Dunia Nyata & Dunia Maya, Anak Muda Indonesia Memiliki Toleransi Beragama Tinggi  
Oleh **ANDI AHMAD YANI**
  - 11** Sinergi Komunto & Masyarakat Adat untuk Pelestarian Laut Tomia  
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
  - 15** Orang Tobelo Benteng Terakhir Hutan Halmahera  
Oleh **FARIS BOBERO**
  - 22** Mengukur dan Memahami Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia Selama Pandemi COVID-19  
Oleh **Elizaveta Perova, Daniel Halim & Diana J. Arango**
  - 25** Berjemur Sembari Santai di Pantai Tablolong, Kupang  
Oleh **MUSTAFA IMAN**
  - 27** Laut Mati di Pulau Rote, Objek Wisata Unik yang Belum Banyak Terjamah  
Oleh **MUSTAFA IMAN**
  - 29** Cara-Cara Sederhana Memahami Perspektif Gender dalam Kebijakan Publik  
Oleh **NOPITRI WAHYUNI**
  - 32** Meningkatkan Mutu Pendidikan Sejak dalam Perencanaan  
Oleh **HALIA ASRIYANI**
  - 36** Menuju Kemandirian Komunitas dalam Pendampingan Pasien TBC Resistan Obat di 4 Wilayah di Indonesia  
Oleh **AMADEUS REMBRANDT**
  - 38** Saya Sunardi Petani Sawit, Tapi Saya Bisa  
Oleh **NOFI ARIYANTO**
  - 40** Diskusi *Online Live* di Instagram Story @infobakti
  - 41** Batukarinfo.com
- Foto Cover : **Luna Vidya /Yayasan BaKTI**



# MENENTUKAN MAKNA KERENTANAN DI ERA PANDEMI

Oleh **PUSKAPA UI**

*Bantuan dari pemerintah  
masih belum tepat sasaran.  
Kita perlu definisi  
kerentanan baru.*

**K**etika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendadak merumahkan penduduknya untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, sebagian besar pihak berasumsi kondisi ini hanya sementara. Namun, pemerintah pusat kemudian memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, akibat meluasnya penularan COVID-19 ke berbagai provinsi. Warga mulai cemas karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bisnis pariwisata dan sejumlah usaha berskala kecil menengah yang terkait sektor ini langsung terkena imbasnya ketika sejumlah penerbangan dari luar negeri dihentikan. Moda transportasi antar kota di dalam negeri pun dibatasi. Para pedagang kaki lima di kota-kota besar memilih pulang kampung (tanpa bisa dicegah) karena penghasilan mereka menurun drastis. Para pengusaha di bidang jasa pun limbung, bahkan mati suri.



Dalam keterbatasan itu, pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi ini. Tentu saja, sasaran utama mereka adalah kelompok miskin, yang selama ini terdata oleh Kementerian Sosial. Bantuan sosial (bansos) diberikan kepada mereka berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masalah muncul ketika penyaluran ini dimulai. Hingga 31 Juli 2020, Ombudsman-RI melaporkan bahwa pihaknya menerima



Program bantuan sosial bagi rakyat terdampak Pandemi COVID-19 dari Kementerian Sosial RI  
Sumber: <https://wanmedia.co.id/wp-content/uploads/2020/12/IMG-20201207-WA0004.jpg>

1.621 pengaduan terkait masalah pelayanan publik dari dampak wabah COVID-19 (Kompas.id, 5 Agustus 2020). Sekitar 83 persen dari pengaduan tersebut atau sekitar 1.346 di antaranya terkait masalah penyaluran bantuan sosial.

Contoh penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran pun ramai menghias media. Salah satunya, kisah viral seorang nenek yang menolak bantuan beras, dan meminta beras diberikan kepada yang membutuhkan di Sumatera Barat (www.merdeka.com, 20 April 2020), Sumatera Utara (sumut.indozone.id, 21 April 2020) hingga

Nusa Tenggara Timur (Kompas, 3 Mei 2020). Lalu berita tentang kunjungan kerja Komisi VIII DPR di Banten yang menemukan penerima bantuan adalah pegawai negeri sipil, anggota dewan dan orang kaya (katadata.co.id, 3 Juli 2020).

Data yang tak akurat dan rumit juga menyebabkan penyaluran bantuan sosial tertunda, sehingga banyak bahan sembako membusuk dan terpaksa dimusnahkan (Kompas, 29 Juni 2020). KPK menyampaikan dari 1,047 aduan mengenai bansos yang diterima, sebagian besar adalah aduan warga yang tidak menerima bantuan meski telah

memenuhi syarat dan telah mendaftar (Kompas.com, 9 September 2020).

Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa yang perlu dibantu ternyata lebih banyak dari yang selama ini terdata. Gelombang pemutusan hubungan kerja menyusul bergugurannya sejumlah unit usaha, pemotongan upah di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur, dan semakin meningkatnya pasien COVID-19 serta jumlah pasien yang meninggal, memunculkan kelompok-kelompok baru yang membutuhkan perhatian, di luar DTKS.

Situasi itu mendorong pemerintah pusat memperluas jangkauan pemberian bantuan.

Pemerintah telah menambah anggaran belanja sebesar 695,2 triliun rupiah ke APBN 2020, bagi penanganan wabah virus Corona (Katadata, 10 Agustus 2020). Khusus untuk perlindungan sosial pemerintah meningkatkan anggaran hingga 242,15 triliun rupiah (Kompas.com, 29 September 2020). Bantuan sosial pun diberikan melalui saluran penyaluran bantuan yang telah ada jauh sebelum pandemi. Bantuan itu, antara lain, berupa bantuan langsung tunai, paket sembako, subsidi listrik, bantuan untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH), insentif kartu prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar, subsidi kuota internet bagi pelajar, subsidi gaji. Pemerintah pun turut juga mengalokasikan 120,61 triliun rupiah untuk insentif usaha, dan 123,46 triliun rupiah untuk bantuan kepada UMKM (Katadata, 10 Agustus 2020).

Pemerintah daerah pun mencoba berinovasi. Di Jawa Barat, misalnya, perangkat RT/RW mendata keluarga yang tidak termasuk dalam DTKS. Kategori 'kelompok miskin baru' pun muncul untuk mencakup keluarga yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19 serta keluarga yang memiliki anggota dengan riwayat penyakit kronis. Data baru ini kemudian diajukan bupati atau walikota ke gubernur agar yang tercatat dapat menerima bantuan. Tentu proses ini akan memakan waktu, sehingga tak jarang ada yang berkomentar sinis di laman media daring, seperti yang terlihat di bagian komentar laman pikiran-rakyat.com, pada 8 Mei 2020. Di situ salah seorang berkomentar, "*Harese rek mere bantuan*

*oge...nunggu malodar ku covid jeng kalaparan jiga na..* (terjemahan bebas: Mau ngasih bantuan aja susah... mungkin nunggu orang-orang pada meninggal karena COVID-nya dan kelaparan baru dikasih)".

Bagaimana mendorong agar upaya pemberian bantuan pemerintah menjangkau kelompok-kelompok yang membutuhkan dengan cepat dan tepat sasaran? Jawabannya, menurut Kementerian Keuangan adalah dengan memperbarui data, yang bisa secepatnya diajukan pemerintah daerah mulai tahun ini juga. Namun, jangan lupa, bantuan sosial ini sifatnya jangka pendek dan hanya menasar pada kebutuhan ekonomi yang sifatnya sementara. Lantas, siapa yang seharusnya memperoleh prioritas dalam penanganan pandemi ini termasuk dampaknya di masa depan?

Mari kita tengok siapa saja kelompok yang mendesak untuk dibantu dan dilindungi dalam beberapa kebijakan yang berlaku selama ini. Pandemi COVID-19 telah resmi dinyatakan sebagai bencana non alam berskala nasional. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2018, kelompok yang dianggap paling mudah atau berisiko tinggi menjadi korban atau rentan terhadap dampak bencana adalah bayi, anak usia di bawah 5 tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (lansia). Biasanya, mereka inilah yang memperoleh prioritas dalam kebijakan publik ketika bencana melanda. Di sisi lain, banyak pihak yang mengidentifikasi kelompok lain dalam kategori 'rentan' tersebut, misalnya, kelompok minoritas, korban kekerasan, maupun kelompok yang selama ini tidak pernah masuk dalam sistem pendataan nasional.

Sementara itu, dalam menyalurkan bantuan atau menjalankan program pengentasan kemiskinan, pemerintah umumnya merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, kelompok miskin (yang kemudian menjadi sasaran bantuan pemerintah) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, tolok ukurnya adalah daya konsumsi penduduk.

Namun, faktanya, saat ini orang bisa mengalami beberapa kondisi di atas akibat wabah penyakit COVID-19. Misalnya, perempuan hamil yang menjanda karena suaminya meninggal akibat COVID-19 dan harus menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Atau seseorang yang dipecat karena perusahaan bangkrut gara-gara bisnis lesu, tapi harus merawat orang tuanya yang telah lanjut usia dan menopang hidup saudaranya penyandang disabilitas. Bisa juga, anak yang tidak bisa bersekolah karena tak ada akses internet di daerahnya, atau anak tunawisma penyandang disabilitas yang keluarganya terinfeksi COVID-19, dan lain-lain.

Dalam situasi yang semakin tidak menentu karena cepat dan meluasnya penyebaran COVID-19, kondisi tiap orang pun mudah berubah. Karena itu, penting sekali memperluas definisi kelompok yang berisiko tinggi atau rentan karena beberapa penyebab. Pertama, seseorang bisa menjadi rentan, sebagai imbas kebijakan tertentu. Contohnya, orang yang mendadak kehilangan mata pencaharian akibat pemberlakuan pembatasan sosial. Kedua, seseorang masuk dalam kelompok berisiko tinggi karena dukungan dan respons pemerintah yang tidak tepat. Misalnya, seseorang yang tidak bisa mengikuti aturan selama pandemi untuk menjaga jarak ketika berada di tempat-tempat umum dan tidak mengenakan masker, sehingga terinfeksi COVID-19 dan harus dirawat. Penyebab ketiga adalah risiko yang bertambah akibat respons yang tidak tepat tadi. Contoh yang paling mudah, seseorang yang telah terinfeksi berpotensi menularkan pada anggota keluarganya.

Untuk memetakan kelompok-kelompok tersebut, Bappenas bekerja sama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUKAPA UI), UNICEF, dan KOMPAK merumuskan kajian kebijakan yang memperluas definisi 'kelompok rentan' akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan kajian teoritis, analisis data sekunder dan studi literatur yang ada, definisi kerentanan dalam kajian ini adalah: "...kondisi yang secara tidak proporsional dialami individu tertentu, akibat ketiadaan akses karena kemiskinan, keterpencilan, atau keterbatasan mobilitas, ketimpangan kualitas

layanan publik, dan penyisihan berbasis usia, disabilitas, dan identitas sosial seperti gender, agama, etnis, dan seksual."

Bagaimana seseorang bisa masuk dalam kategori rentan? Seperti yang dipaparkan oleh Adger (2006) serta Smit & Wandel (2006), kerentanan dipengaruhi oleh tiga aspek yang saling memengaruhi. Ketiga aspek itu adalah paparan (*exposure*), sensitivitas (*sensitivity*), dan kurangnya kemampuan adaptasi (*lack adaptive capacity*). Ketiga faktor ini diimbuhi oleh ketersediaan dukungan dan fasilitas secara struktural. Dengan kata lain, jika terjadi ketimpangan struktural, yang menyebabkan dukungan dan fasilitas tidak dapat diakses dengan setara, maka posisi seseorang akan semakin rentan.

Dinamika ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan melalui ilustrasi seperti ini. Tono dan Meni adalah pasangan suami istri di Desa Kembang. Dulu mereka menikah secara agama. Karena tak punya uang, mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama. Keduanya berasal dari keluarga petani penggarap di desanya. Ketika Ayah Tono meninggal dunia, dan tanah garapan dijual pemiliknya, Tono memutuskan untuk pindah ke kota. Untuk itu, dia memboyong Meni, ketiga anaknya, dan ibunya yang telah lanjut usia ke kota Bunga.

Sesampainya di kota Bunga, Tono, Meni dan keluarganya tinggal rumah kontrakan ukuran 3x5 meter di perkampungan kumuh yang padat. Mereka bekerja serabutan. Tono acap bekerja sebagai kuli bangunan, dan Meni berjualan gorengan di pasar. Sayang, anak-anak mereka tak bisa bersekolah di kota, karena tak memiliki akta kelahiran. Tono dan Meni juga tak mampu mengurus dokumen terkait kepindahan mereka karena untuk keperluan itu, mereka harus bolak-balik ke kampung.

Sehari-hari, jika Tono dan Meni mesti bekerja, Mbah Eni, yakni ibu Tono, yang mendampingi cucu-cucunya. Anak Tono dan Meni yang sulung, Cinta (12 tahun), menderita *cerebral palsy* sejak lahir. Untuk kegiatan sehari-hari, Cinta membutuhkan bantuan dari orang-orang terdekatnya. Mbah Eni dulu mampu membantu. Namun, belakangan karena usia, Mbah Eni mulai menderita demensia. Terpaksa Tono dan Meni mengandalkan tetangga terdekat

untuk membantu keseharian Mbah Eni, dan Cinta, dan kedua anaknya yang lain, jika mereka tak di rumah.

Suatu hari, Tono mengalami kecelakaan saat sedang bekerja. Dia terjatuh dari lantai dua karena mengecat tembok tanpa pengaman. Akibat kecelakaan itu, Tono meninggal dunia. Meni pun menjadi satu-satunya pencari nafkah untuk keluarganya. Setiap hari dia berdagang ke pasar, membantu pekerjaan rumah tangga, mengemis bahkan memulung agar mampu menghidupi keluarganya. Kedua anaknya yang lain, Adi (8 tahun) dan Tini (5 tahun) sering dia bawa untuk mengamen di pasar atau memulung di jalanan.

Ketika pandemi melanda, dan pembatasan sosial diberlakukan, Meni tak lagi bisa berjualan bebas, mengamen atau memulung di jalanan. Berjualan di pasar begitu ramai orang, sehingga Meni sulit menjaga jarak. Tinggal di rumah saja pun tak membantu. Meni tak bisa menjangkau pembeli, karena tak mampu membeli telepon genggam, apalagi membeli kuota internet untuk berjualan *online*. Tawaran pekerjaan membantu rumah tangga berkurang drastis. Demi sesuap nasi, Meni nekat tetap berjualan di pasar.

Sementara itu, di rumah petak mereka, anak-anak merasa sesak dan terkurung. Di tempat mereka tinggal, warga biasa membuang hajat dan mencuci di kali, dan kekurangan fasilitas air bersih. Karena lingkungan begitu padat, susah sekali keluar rumah tanpa harus terjebak dalam kerumunan. Sulit sekali menjalankan kebiasaan hidup sehat. Orang-orang yang biasa membantu merawat Mbah Eni, dan Citra kini tak bisa datang.

Kisah di atas menunjukkan bagaimana ketiga aspek dalam kerentanan melekat dalam kehidupan anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia di keluarga Tono dan Meni, yang mengalami kemiskinan struktural sebagai keluarga petani penggarap yang pindah ke kota. Sejak awal, dari segi administrasi kependudukan, keluarga ini menjadi rentan ketika Tono dan Meni tak mencatatkan pernikahannya. Tanpa buku nikah, anak-anaknya pun tak bisa memiliki akta kelahiran. Situasi ini diperberat ketika Tono dan Meni tak melaporkan status kepindahan mereka. Akibatnya, anak-anak dan lansia di keluarga ini

amat rentan terhadap peristiwa yang mengguncang keluarga. Contoh, ketika pindah, anak-anak terpaksa tak sekolah karena data mereka tak tercatat. Ketika ayahnya meninggal, akhirnya Adi dan Tini malah ikut mencari nafkah bersama ibunya.

Hidup lebih sulit bagi Citra yang disabilitas dan Mbah Eni sebagai lansia, yang amat bergantung pada bantuan orang sekitar. Di era pandemi ini, kemungkinan bahwa anak-anak (termasuk Citra yang disabilitas), serta Mbah Eni bisa terpapar virus Corona amat besar karena harus bersinggungan dengan banyak orang. Pekerjaan Meni yang membuat ia berkecimpung di pasar atau jalanan yang ramai meningkatkan risiko dirinya terpapar virus juga. Sedihnya, tanpa dokumen kependudukan, keluarga Meni kesulitan mengakses layanan dasar, terutama kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.

Dari ilustrasi itu, bisa dibayangkan bahwa pandemi kali ini dapat menimbulkan kesulitan yang berlapis pada berbagai kelompok, terutama anak, lansia, dan difabel. Selain itu, wabah Corona juga semakin memperbesar risiko bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, seperti mereka yang tak dapat mengakses layanan publik karena tak terdata, kelompok miskin, mereka yang tak terungkap melalui data statistik atau tersembunyi, kelompok yang mengalami stigma di masyarakat, mereka yang akibat identitasnya mengalami kesulitan hidup dan diskriminasi.

Kerentanan ini bersifat dinamis. Dan selanjutnya, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu kelompok semakin terbatas untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan, dan secara sosial maupun politik.

Bagaimana mengelompokkan dan mengkategorikan mereka yang termasuk kelompok rentan ini? Kajian kebijakan ini memaparkan secara rinci siapa dan bagaimana kelompok rentan tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari:

<https://puskapa.medium.com/menentukan-makna-kerentanan-di-era-pandemi-7bf920ba3b16>





# Pascapandemi COVID-19, Bisakah Pandangan Manusia Terhadap Bumi Berubah?

Oleh **Aryanto Husain**



Jika Pandemi COVID-19 ini terjadi pada 2030 nanti, kita mungkin tidak hanya cemas dan khawatir. Teror dan takut akan menghiasi kehidupan manusia pada saat itu. Para pakar memprediksikan sepuluh tahun dari sekarang bumi sudah dalam kondisi *absolutely crisis*. Menghadirkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat menuju revolusi industri teknologi terkini, era 6.0, tidak bisa memecahkan semua masalah. Inovasi *Artificial Intelligence, Robotic, Biomimicry* dan berbagai inovasi teknologi lainnya hanya bisa memuaskan kebutuhan manusia namun belum bisa memecahkan permasalahan kehidupan secara menyeluruh.



Kegagalan global menghadapi pandemi COVID-19 adalah salah satu bentuk tidak berdayanya kemampuan teknologi yang dimiliki manusia saat ini. Apapun alasannya, apakah teori 'konspirasi' atau karena siklus tahunan pandemi, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menghadirkan vaksin penangkalnya secepat *outbreak* Virus Sars Cov-2.

Persoalan lainnya adalah kesadaran terhadap permasalahan bumi masih bersifat retorika dan paradoksal. Kesadaran kita terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi sangat penting. Bumi memiliki sumber daya yang terbatas. Alih-alih menahan hasrat di tengah kelangkaan sumber daya, keinginan manusia justru melewati batas yang seharusnya, bahkan sering bermuara pada kompetisi dan konflik penguasaan sumber daya.

Kita telah melewati banyak kesepakatan, mulai KTT Bumi 1992 hingga Rio+20. Namun fakta menjelang *Paris Agreement 2015* laju emisi karbon belum bisa dikendalikan. Negara maju

seperti bermain pat gulipat, permainan menuju kompetisi yang tidak sehat, kondisi *nash equilibrium*.

Seperti dalam teori *prisoner's dilemma*, kompetisi ditengah makin langkanya sumber daya ini membuat banyak negara *wait and see*. Satu sama lain saling menunggu, curiga dan mencuri-curi kesempatan untuk dirinya. Kondisi *nash equilibrium* seharusnya menjadi *alert* bagi kesadaran sebelum bumi mengalami *tragedy of common* secara global

### **Kenapa kesepakatan ini penting?**

Awal tahun ini, Majalah Tempo mengabarkan pecahnya salah satu bongkahan es terbesar di laut Antartika. Ini hanya mengikuti lelehan es kutub yang terus mencair dan menyebabkan paras air laut naik. Kita perlu sangat khawatir. Dampaknya sangat luar biasa, bisa mengubah bumi menjadi tidak seperti yang kita lihat sekarang.

Skenario *optimistic view* pada pertemuan IPCC, 2018, suhu bumi akan terus meningkat



Hilangnya es di Greenland dan menyusutnya gletser di bagian lain Arktik saat ini berkontribusi hingga 40% dari rata-rata kenaikan permukaan laut global 3 mm per tahun. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Greenland bisa menjadi penyumbang utama potensi kenaikan permukaan laut 0,5 hingga 1 meter pada akhir abad ini.  
Sumber: [www.grida.no/resources/4190](http://www.grida.no/resources/4190)

hingga 3,2 derajat celsius sebelum pemanasan global berhenti. Pada kondisi ini es akan terus mencair menyebabkan Hongkong, Shanghai, Miami kebanjiran. Saat kawasan selatan Eropa mengalami kemarau permanen, kebakaran lahan di AS meningkat hingga 600%.

Pada skenario *pessimistic*, suhu bumi diprediksi meningkat hingga 8 derajat celsius pada 2100. *Geostorm* yang dahsyat terjadi dimana-mana, banjir di dua per tiga belahan bumi dan penyakit tropis yang mewabah tidak

m e m u n g k i n k a n l a g i kehidupan seperti yang kita alami saat ini.

### **Necessary Revolution**

Dunia masih menunggu bagaimana akhir pandemi COVID-19. Polemik tentang strategi menghentikan penularan juga belum berhenti, vaksin, terapi imunitas lainnya atau membiarkan penjangkitan mencapai tahap terbentuknya *herd immunity*. Kegagalan ini mengkhawatirkan. Sekjen WHO telah memperingatkan kemungkinan datangnya pandemi lain, yang mungkin bisa lebih dahsyat.

Pandemi mendatang bisa jadi karena dampak *global warming*, berasal dari peluruhan es. Pada 2015, ilmuwan AS dan Tiongkok mengebor gletser sedalam 50 meter dan menemukan virus kuno di dalam lapisan es gletser, termasuk 28 kelompok virus baru dalam dunia sains. Lapisan salju abadi di kutub menyimpan varian flu seperti strain flu yang tersimpan dalam Es Alaska yang pada 1918 membunuh 80 juta orang. Artinya jika pemanasan global tidak dihentikan sekarang,

dunia harus bersiap dengan pandemi berikutnya yang akan menyerang tanpa harus menunggu siklus 70-100 tahunan.

Menghentikan pemanasan global adalah langkah awal melindungi bumi dari serangan pandemi dan wabah lainnya. Semua harus terlibat dalam sebuah revolusi penyelamatan, *Necessary Revolution*, baik dalam kebijakan pembangunan maupun sikap individual.

Kebijakan pembangunan yang pro pertumbuhan harus dikoreksi. Belajar dari krisis keuangan 2008, kebijakan pro pertumbuhan adalah sesuatu yang *miss guide*, perlu pendekatan yang pro kemakmuran yang lebih komprehensif dan substansial. Antara lain melalui kebijakan hijau di masa depan yang pro keberlanjutan, *a greener future*.

Pandemi COVID-19 membuktikan pentingnya kehadiran kebijakan pro kemakmuran (*prosperity based*). Selama pandemi ini uang tidak menjadi segalanya, sebaliknya manusia didorong makin menghargai kesehatan dan memberikan respek terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini membutuhkan kebijakan yang mendukung seperti mensyaratkan pusat-pusat perekonomian menyediakan sarana prasarana yang ramah lingkungan serta nyaman bagi interaksi sosial masyarakat dan keagamaan.

Perubahan *mindset* individu terutama pada perilaku konsumsi. Sebagai konsumen masyarakat memiliki pengaruh dalam ekonomi. Semakin banyak pembelian produk sehat yang dihasilkan dalam rantai produksi ramah lingkungan maka semakin besar pengaruhnya terhadap faktor-faktor produksi. Seorang vegetarian, misalnya, secara tidak langsung memberi andil dalam upaya menekan emisi karbondioksida, *land clearing* dan penyelamatan lingkungan.

Sebuah revolusi sederhana yang cukup memadai bagi sebuah perubahan pascapandemi COVID-19. *Necessary Revolution*.

Mari Berubah untuk Bumi yang Lebih Baik!

### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Penulis adalah Koordinator Wilayah Forum KTI Wilayah Gorontalo dan sehari-hari Kabid Ekonomi Bappeda Provinsi Gorontalo. Dapat dihubungi melalui email [ariie04@yahoo.com](mailto:ariie04@yahoo.com) dan <https://m.aryantohs.com>



Foto: Septianda Perdana/Antara Foto

RISET:

## Baik di Dunia Nyata & Dunia Maya, Anak Muda Indonesia Memiliki Toleransi Beragama Tinggi

Oleh **ANDI AHMAD YANI**

**B**eberapa kota besar di Indonesia termasuk dalam kota-kota yang intoleran menurut lembaga studi SETARA Institute. Sejauh mana penilaian itu tercermin dalam sikap anak-anak mudanya?

Sejak 2015, lembaga studi SETARA Institute rutin mengeluarkan laporan skor toleransi kota-kota di Indonesia.

Studi itu adalah satu dari sekian banyak penelitian dalam dua dekade terakhir yang memetakan dan mengukur perkembangan kualitas toleransi di Indonesia sebagai upaya deteksi dini kemungkinan berkembangnya intoleransi.

Pada 2018, SETARA menamakan Jakarta; Sabang dan Banda Aceh di Aceh; Medan dan Tanjung Balai di Sumatra Utara; Padang di Sumatra Barat; Cilegon di Banten; Depok dan Bogor di Jawa Barat; dan Makassar di Sulawesi Selatan sebagai 10 kota dengan skor toleransi terendah.

Meskipun penelitian SETARA ini tidak secara khusus menargetkan remaja sebagai objek studi, namun penelitian itu menunjukkan potensi intoleransi di kalangan remaja terjadi di beberapa kota di Indonesia.

Apakah anak-anak muda di kota yang termasuk intoleran memiliki sikap berbeda dengan mereka yang di kota toleran?

Untuk menganalisis sikap toleransi di generasi muda, saya dan tim meneliti sikap sosial Generasi Z, atau sering disebut juga “*Centennials*”, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di kota-kota yang dinilai toleran dan intoleran.

Studi kami menunjukkan bahwa di manapun mereka berada, generasi *Centennials* sangat mendukung toleransi beragama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas media sosial.

### **Baik di kota toleran maupun intoleran**

Kami tahun lalu mengumpulkan data dari 1.854 responden berusia 17 hingga 25 tahun lewat kuesioner daring di 10 kota toleran dan tidak toleran menurut riset SETARA. Lima kota pertama adalah kota-kota yang pada 2017 masuk kategori intoleran SETARA yaitu Banda Aceh, Padang, Mataram di Nusa Tenggara Barat, Makassar, dan Yogyakarta. Lima kota lain adalah yang dikategorikan toleran, yaitu Salatiga dan Surakarta di Jawa Tengah; dan Binjai, Pematang Siantar, dan Tebing Tinggi di Sumatera Utara.

Survei tersebut kami sebar di sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah agama (madrasah aliyah, sekolah Islam, sekolah Kristen) yang umumnya di daerah urban yang menjadi fokus studi SETARA Institute. Latar sosioekonomi responden kami sangat beragam mulai dari ekonomi bawah sampai ekonomi menengah ke atas.

Namun yang jadi persamaan adalah kehidupan Generasi Z kental dengan aktivitas internet. Mereka adalah “*digital natives*” yang sejak dini berinteraksi dengan perangkat teknologi informasi dan berselancar di dunia digital. Oleh karena itu, kami juga meneliti apakah ada perbedaan sikap toleransi beragama mereka antara di dunia nyata dan interaksi di internet. Berdasarkan temuan kami, anak muda bisa menghabiskan waktu 3 hingga 5 jam per hari untuk berinteraksi di internet, khususnya di media sosial.

Meski diakui secara luas bahwa media sosial memiliki manfaat yang luar biasa untuk pengguna generasi muda, namun tidak bisa dipungkiri bahwa platform media sosial juga memiliki efek berbahaya termasuk kemungkinan meresapnya nilai intoleransi dan

radikalisme. Mayoritas responden kami mengungkapkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain khususnya di lingkup pertemanan, lingkungan, dan organisasi.

Tren toleransi yang sama ditunjukkan oleh anak muda di media sosial. Mayoritas responden (62%) sangat toleran terhadap topik terkait agama yang berbeda dengan keyakinannya di media sosial. Mereka menentang pernyataan yang menyinggung agama lain.

Responden kami menegaskan konsistensi perilaku Generasi Z di dunia nyata dan di dunia maya: di kedua ranah tersebut, mereka menunjukkan toleransi terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Ini berbeda dengan dengan sikap kelompok usia yang lebih beragam (responden berusia 17 tahun ke atas) dalam studi Lembaga Survei Indonesia dan Wahid Institute tahun 2019. Studi itu menunjukkan tren meningkatnya intoleransi, khususnya terkait pembangunan rumah peribadatan, pelaksanaan ibadah di lingkungan sekitar di luar rumah ibadah, dan pemilihan pemimpin.

Toleransi responden kami terhadap latar belakang suku yang berbeda juga tinggi. Sebanyak 85% responden merasa nyaman berteman dengan orang dari etnis yang berbeda; 87% responden mengatakan memilih untuk bergabung di grup sosial media yang anggotanya berasal dari etnis yang beragam.

### **Masa depan toleransi**

Studi kami menunjukkan bahwa *Centennials* -baik yang tinggal di kota toleran maupun tidak toleran menurut SETARA Institute-terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda agama dan etnis secara langsung maupun lewat internet. Sikap Generasi Z juga menegaskan bahwa bahwa toleransi antar etnis telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena sikap toleransi ini ada di kalangan anak muda Indonesia, maka ini memberi kita harapan bahwa sikap-sikap ini tampaknya akan terus berlanjut di masa depan.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Penulis adalah Dosen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin. Artikel bersumber dari *The Conversation Indonesia* dan dapat dibaca pada link berikut: <https://theconversation.com/riset-baik-di-dunia-nyata-dan-dunia-maya-anak-muda-indonesia-memiliki-toleransi-beragama-tinggi-151716?>



# Sinergi Komunito & Masyarakat Adat untuk Pelestarian Laut Tomia

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

**K**

omunito atau Komunitas Nelayan Tomia adalah sebuah organisasi berbasis komunitas yang ada di Pulau Tomia, salah satu pulau di gugusan kepulauan Wakatobi, Sulawesi

Tenggara. Komunitas ini terdiri dari perwakilan kelompok nelayan dari Tomia. Organisasi ini didirikan sebagai tanggapan atas keprihatinan bersama masyarakat tentang penangkapan ikan komersial asing, penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak dan aktivitas penangkapan ikan lainnya yang mengancam biota dan lingkungan laut.



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Di awal berdirinya, Komunto didasari atas perasaan senasib dan sepenenderitaan akan kondisi laut yang semakin rusak dan pendapatan nelayan yang semakin menurun. Olehnya Abas dan beberapa nelayan lainnya membentuk kelompok-kelompok nelayan kecil di setiap desa.

Praktik yang dilakukan Komunto adalah mendorong pengelolaan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu kegiatannya adalah membentuk Bank Ikan. Bank Ikan yang merupakan kawasan khusus di mana ikan dibiarkan memijah, berkembang biak untuk kemudian diambil di waktu tertentu. Melalui



Foto: Dok. Komunto

kegiatan ini Komunto mempromosikan partisipasi lokal melalui zonasi dan perencanaan tata ruang Taman Nasional Wakatobi, dan menetapkan tiga kawasan lindung di sekitar pulau Tomia untuk memungkinkan regenerasi stok ikan.

Salah satu agenda besar Komunto dalam pelestarian biota laut dan lingkungan Tomia adalah memberikan pendampingan dan penguatan kepada tetua adat secara kelembagaan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tetua adat punya pengaruh dan peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Tomia.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani. Setiap masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut.

Sejak dahulu masyarakat Tomia memegang teguh prinsip penangkapan berbasis kearifan lokal. Prinsip ini mengandung nilai-nilai

tradisional dan arif. Saat ini Komunto sedang menuntaskan kegiatan pendampingan masyarakat hukum adat terkait tata kelola penangkapan ikan endemik pulau Tomia dan pendampingan desa wisata.

Salah satu sistem perikanan turun temurun yang pernah dijalankan masyarakat di pulau Tomia adalah tradisi dan cara penangkapan ikan Ole yang endemik dan bermusim. Proses penangkapan ikan Ole disebut juga *Heole-Olea*. Cara penangkapan ikan Ole dilakukan dengan alat tradisional dan dipimpin oleh seorang Parika. Parika adalah kelembagaan yang sudah ada dalam kelompok nelayan Tomia. Seorang Parika adalah seseorang yang memiliki kemampuan mistik yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Parika juga dianggap sebagai penjaga, pengawal dan penasihat dalam menentukan daerah penangkapan dan waktu penangkapan ikan. Sistem Parika berlangsung secara turun temurun dan sampai sekarang masih terus dilaksanakan. Namun seiring berjalannya waktu, pola penangkapan seperti ini kemudian mulai mengalami pergeseran termasuk ketokohan *Parika* dan *sara adat* (pemangku adat).

Untuk menghidupkan kembali sistem perikanan berbasis kearifan lokal, maka *sara adat* sebagai unsur pelaksana sistem harus dikuatkan kembali. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu agenda Komunto yang mulai dijalankan sejak bulan Agustus lalu. Komunto intens berkomunikasi dan berdiskusi dalam membangun pemahaman kearifan lokal bersama para tetua adat. Dalam melaksanakan kegiatan ini Komunto bermitra dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau disingkat YKAN.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pendampingan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA) terkait tugas pokok dan fungsinya terutama dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendampingan dan penguatan yang dilakukan utamanya terkait dengan konservasi dan pelestarian sumber daya alam Tomia.

Komunto menyadari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir penting untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk lembaga adat sebagai salah satu institusi yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat.



Sejak bulan Agustus 2020, mulai dilakukan pertemuan rutin antara pemangku kepentingan dengan *sara adat* untuk membahas pengelolaan ikan Ole secara berkelanjutan berbasis adat. Selain untuk menguatkan tugas dan fungsi *sara adat*, rangkaian pertemuan tersebut juga bertujuan untuk menyusun peta pengelolaan wilayah adat dan pembuatan kesepakatan peraturan adat tentang tata cara penangkapan ikan Ole. Saat ini telah tersusun peraturan adat tentang tata cara penangkapan ikan Ole serta peta wilayah penangkapannya.

Hal ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, baik dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi hingga masyarakat di Pulau Tomia. Momentumnya adalah dengan disepakatinya peta wilayah adat Kawati Tomia dan lahirnya Peraturan Bupati Wakatobi tentang MHA No. 45 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Kawati dalam Wilayah Pulau Tomia di Kabupaten Wakatobi.





Foto-foto: Dok. Komunto

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada Selasa, 17 November 2020, Masyarakat Hukum Adat di lingkup wilayah adat Kawati, melaksanakan deklarasi penangkapan dan pengelolaan ikan Ole dalam wilayah kelola adat Kawati Pulau Tomia.

Deklarasi ditandatangani bersama oleh tetua hukum adat, pemerintah kabupaten Wakatobi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, UPTD Perikanan Pulau Tomia, Kepolisian, TNI, Balai Taman Nasional, Pemerintah Kecamatan Kaledupa, Pemerintah Desa dan perwakilan nelayan. Adapun isi dari deklarasi yakni:

1. Ikan Ole adalah ikan endemik Pulau Tomia yang harus dilestarikan keberlanjutannya.
2. Wilayah penangkapan ikan Ole adalah wilayah kelola masyarakat hukum adat pulau Tomia.
3. Penangkapan ikan Ole dilakukan setelah ikan Ole bertelur atau memijah pada pukul 04:00 WITA, waktu dimana sudah mulai memijah dan dapat dijaring.

4. Sifu dan alat tangkap lain yang tidak ramah lingkungan dilarang penggunaannya dalam penangkapan ikan Ole/Opuru di wilayah kelola masyarakat hukum adat pulau Tomia dan mata jaring yang diperbolehkan yaitu 3/4 inci atau 1/2 inci.
5. Masyarakat hukum adat nelayan dan pihak terkait lain wajib melakukan pengawasan pada lokasi pemijahan ikan Ole dari segala aktivitas yang merusak.
6. Setiap orang yang melanggar kesepakatan adat ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Bupati Wakatobi nomor 45 tahun 2018 pasal 12 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis MHA Kawati dalam wilayah pulau Tomia di Kabupaten Wakatobi.

Para tokoh adat sepakat menghidupkan kembali sistem perikanan berbasis kearifan lokal pada ikan yang dikhawatirkan akan punah tersebut. Hal ini sebagai upaya menguatkan tugas dan fungsi sara adat (pemangku adat) sebagai unsur pelaksana pranata adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Pendampingan dan penguatan terhadap tetua adat merupakan hal yang sudah lama diinginkan oleh tetua adat karena ada kekhawatiran jika perlakuan tidak ramah lingkungan dalam penangkapan ikan dan tata kelolanya tidak diatur maka akan berdampak buruk bagi masa depan perikanan di daerah ini”, ungkap Abas, ketua Komunto.

Kegiatan ini didukung oleh Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi, Komunitas Nelayan Tomia (KOMUNTO), dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Pada dasarnya kearifan lokal bisa mengkomodir dan bisa sejalan dengan tujuan dari kawasan konservasi itu sendiri dengan tujuan melindungi suatu kawasan dan biota dari kawasan itu sendiri. Merangkul dan menguatkan masyarakat hukum adat dalam kegiatan konservasi adalah sebuah strategi bijak dalam mencapai tujuan besar kelestarian biota laut Tomia, Wakatobi.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas ini, Anda dapat menghubungi email: [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# Orang Tobelo

## Benteng Terakhir Hutan Halmahera

Oleh **FARIS BOBERO**



Hujan baru reda. Bunga, sedari tadi berteduh, beranjak dari tempat duduk. Lelaki 40 tahun ini memegang sebilah parang untuk mengambil daun pengalas atau pembungkus nasi yang akan dimasak dalam bambu.

Sore itu, akhir November 2020. Aktivitas warga yang sedari pagi tertahan hujan, kembali berjalan. Beberapa anak terlihat membawa gerobak sapi. Mereka menuju kebun mengambil kayu bakar dan padi.

Beberapa orang tua menyiapkan lesung dan menyalakan bara api. Hari itu, akan berlangsung ritual syukuran setelah panen di Kali Molulu, sumber air bagi orang Tobelo di Wangongira, Tobelo Barat, Halmahera Utara, Maluku Utara.

Di seberang sungai, Abdon Ndatti berjalan menuju bivak, tempat penyimpanan padi (*oryza sativa*) yang baru dia panen sepekan lalu. “Ada sekira setengah ton padi. Sebagian sudah digunakan. Padi ini akan bagi juga pada tetangga terdekat. Kami bisa bertahan dengan padi ini selama setahun dalam sekali panen,” kata Abdon.

Padi di Wangongira itu tidak mereka perjualbelikan. Bagi mereka, kalau padi dijual,



akan ada transaksi pasar-barang akan ditukar uang. Kalau padi terjual habis, mereka akan kesulitan mencari pangan pengganti dan harus dibeli dengan uang juga.

“Sudah dari dulu, orang tua kami tidak menjual padi ini,” kata Abdon, mantan Kepala Desa Wangongira.

Dalam legenda orang Tobelo, katanya, dulu kala, ada seorang perempuan ke kebun mengambil padi ladang dengan saloi (keranjang gendong, terbuat dari anyaman bambu). Saat pulang, perempuan ini melewati Kali Molulu. Naas, perempuan tersungkur, jatuh ke kali. Padi yang dia bawa pun tumpah ke sungai.

Dari kisah itu, warga Wangongira percaya, padi yang tumbuh di dalam Sungai Molulu, asal mula cerita dari perempuan itu. Hingga kini, Kali Molulu jadi tempat keramat—dan memberikan mereka sumber kehidupan. Selain itu, padi yang tumbuh di Kali Molulu juga menjadi kalender alam bagi warga di sana.

“Jika padi di dalam sungai berbuah, itu petanda panen telah tiba. Jika padi di sungai itu



Antonius, komunitas O'Hongana Manyawa yang saat ini tinggal di Hutan Halmahera, Maluku Utara, yang saat ini telah menjadi wilayah Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Pada 2011, ia ditemui sedang membawa tombak dan panah untuk berburu. Foto: **Faris Bobero**/ Mongabay Indonesia

rusak dimakan hama, berarti padi ladang dan tanaman lain di daratan juga rusak dimakan hama,” kata Abdon. Hal ini sudah jadi kepercayaan sedari dulu.

Abdon cerita, awalnya, orang Tobelo di Wangongira hidup di Telaga Lina, tak jauh dari Wangongira, sekitar empat sampai lima kilometer ke arah hutan.

Beberapa sumber sejarah menyebutkan, asal mula orang Tobelo bermukim di Telaga Lina, lalu menyebar ke penjuru Halmahera bagian Utara, Tengah, hingga Timur.

Pada tahun 70 hingga 80-an, sebuah gereja protestan masuk untuk mengagamakan Orang Tobelo dari Telaga Lina. “Saat itu, sekira tiga rumah (dihuni oleh orang Tobelo) di Wangongira,” kata Abdon. Baru pada 1986, mulai ada tujuh rumah orang Tobelo. Hingga 1988, semua orang Tobelo di Wangongira, sudah beragama Kristen.

Tahun 2002 dan 2003, kata Abdon, program pemerintah terus masuk memukimkan Orang Tobelo. Saat itu, katanya, mereka, pemerintah

ingin mengeluarkan orang Tobelo dari Telaga Lina ke Desa Tobe atau Telaga Paca, yang sudah dekat dengan akses jalan dan perkampungan.

Roem Topatimasang dalam Orang-orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku (2004) menyebutkan, program pemukiman kembali, mulai dilaksanakan besar-besaran dan sistematis oleh pemerintah Indonesia sejak 1960-an. Pemukiman kembali orang-orang Tobelo Dalam di Halmahera juga didasari stereotip tentang kelompok masyarakat tradisional sebagai suku-suku terasing, terbelakang, primitif, dan animis.

Sejak tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia sudah berupaya merelokasi orang Tobelo dari dalam hutan ke perkampungan, menetap

melalui program *resettlement*.

Para orangtua, kata Abdon, menolak. Mereka menghargai arahan pemerintah, namun tak ingin meninggalkan sejarah dan menjaga sumber air. Dari situlah, para orang tua memilih keluar dari Telaga Lina dan menetap di Wangongira saja.

*“Balubaluhu nangoka dau. Kayoluku yohupu o’berera mahu moa ika. Mahe babu ona imatumu mangale o’akere. To ona manga wawango o’akere genanga.* Orang tua di sini tidak mau keluar karena mereka pertahankan sumber air sebagai kehidupan. Kami tinggal di sini (Wangongira) saja. Karena ada sumber air untuk kehidupan,” kata Abdon.

Kini, ada sekitar 139 keluarga atau 567 jiwa bermukim di Wangongira. Amat di lapangan, hanya sedikit warga asli dari Telaga Lina yang bermukim. Sebagian Suku Tobelo dari Halmahera bagian barat, bahkan ada beberapa warga dari luar Maluku Utara, yang tinggal dan menikah dengan warga tempatan.

Dia bilang, warga asli yang tinggal di Wangongira adalah marga (fam) Gaza. Sebagian

masih bertahan di Telaga Lina-hidup di belantara sekitar. Beberapa penelitian belum bisa mengidentifikasi secara pasti, jumlah orang Tobelo yang masih nomaden di belantara-hutan Halmahera.

Abdon memang Suku Tobelo, namun berasal dari Halmahera bagian barat. Ayahnya, dahulu seorang pendeta, yang mengajarkan orang Tobelo di Wangongira mengenal agama Kristen. Abdon pun diasuh sejak kecil oleh Lukas Gaza dan Yohana Mongor, orang asli dari Telaga Lina juga bermukim di Wangongira.

Lukas, ketika ditemui, bercerita menggunakan Bahasa Tobelo. Katanya, sebelum mengenal agama samawi, mereka masih hidup di atas pohon, selain bivak.

“Saat itu, karena orang Jepang sering masuk ke sini, kami lalu bersembunyi, tinggal di atas pohon agar tidak terlihat oleh orang Jepang,” katanya.

### **Kali Molulu Tak Seperti Dulu**

Orang Tobelo di Wangongira, menyadari, sumber air di Kali Molulu sedang terancam. Kualitas air sudah tidak seperti dulu lagi. Abdon mengatakan, sebelumnya, satu perusahaan air kemasan pernah masuk ke Wangongira, untuk memanfaatkan sumber air di Kali Molulu.

“Bahkan, mereka memasang pipa saluran air tanpa izin warga maupun pemerintah desa. Lalu, saya perintahkan warga untuk bongkar pipa itu,” katanya.

Setelah warga menolak kehadiran perusahaan, ada dinas dari Pemerintah Maluku Utara datang. Menawarkan agar air dikelola mereka. Dibuatlah bronjong. Dampaknya, kata Abdon, air di sekitar Kali Molulu tak mengalir seperti biasa, padi yang tumbuh di dalam kali pun perlahan hilang.

“Dulu, sebelum ada bronjong, padi sangat banyak tumbuh di Kali Molulu. Sekarang tidak. Padi tumbuh di sungai di sana (sungai di seberang Kali Molulu).”

Bahkan, kata Abdon, warga biasa mengambil sumber air minum di sungai itu. Mereka mengonsumsi air itu tanpa dimasak.

“Sekarang, kalau minum air dari Kali Molulu, harus dimasak dulu. Rasanya sudah beda dan sudah banyak lumut di Kali Molulu setelah ada bendungan dan bronjong,” katanya.

“Pada saat dorang (mereka/pemerintah) buat ini (bronjong) ada perjanjian sebelum air ini dikelola keluar di kabupaten, warga di sini harus menikmati air ini,” katanya.

Maksud Abdon, dengan perjanjian itu pemerintah mengelola air agar bisa mengalir ke rumah-rumah warga. Sekarang, pemerintah

---

Desa Wangongira, Tobelo Barat, Halmahera Utara, Maluku Utara. Ada sekira 139 keluarga atau 567 jiwa yang bermukim di sini. Amatan di lapangan, pada November 2020, hanya sedikit saja warga asli dari Telaga Lina yang bermukim. Sebagian adalah Suku Tobelo yang berasal dari Halmahera bagian barat, bahkan ada beberapa warga dari luar Maluku Utara, yang tinggal dan menikah dengan warga tempatan.

Foto: **Faris Bobero**/ Mongabay Indonesia



hanya membuat tiga bak penampungan air di permukiman untuk warga mencuci atau mandi.

### Asal mula Suku Tobelo

Irfan Ahmad, Dosen Ilmu Sejarah Universitas Khairun Ternate mengatakan, berdasarkan catatan Leirissa (1990), sejak orang Tobelo bersekutu dengan Kesultanan Ternate dan mengakui pemerintahan Kolonial Belanda pada Abad XVII, orang Tobelo dibagi menjadi dua komunitas yakni, Tobelo Tia atau Tobelo Pedalaman. Tobelo pedalaman, bermata pencarian utama sebagai petani dan Tobelo Tai atau Tobelo Laut yang bermata pencarian sebagai nelayan.

“Pembagian (komunitas) ini dilakukan oleh Kolonial Belanda, untuk mengetahui dan membedakan penduduk Tobelo yang sudah keluar dan hidup di pesisir pantai,” katanya.

Sebagian cerita rakyat juga menyebutkan, orang Tobelo yang tinggal di hutan itu lari dari *blasting* atau sistem pajak oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Sejumlah literatur dan cerita rakyat juga menyebutkan, Suku Tobelo, yang merupakan etnis terbesar di Pulau Halmahera berasal dari Telaga Lina, Halmahera bagian utara. Sebelum menyebar luas ke Halmahera bagian tengah, timur, hingga Halmahera bagian barat.

Awalnya, kata Irfan, di Telaga Lina, mereka membentuk empat kelompok yang disebut Hoana—satuan pemukiman (bisa disebut kampung). Empat Hoana Suku Tobelo yakni Hoana Lina, Hoana Mumulati, Hoana Huboto, dan Hoana Gura. Para Hoana ini diidentikkan dengan roh leluhur masing-masing. Dari empat Hoana di Telaga Lina itu kemudian menyebar keluar. Ada yang ke Tobelo, ke Kao, dan Galela.

Jesaya Banari, dalam bukunya bertajuk Mencari yang Pernah Ada (2014) menyebutkan, dari empat Hoana itu kemudian menjadi sepuluh Honana yang tersebar di Halmahera bagian utara. Kesepuluh Hoana itu disebut pula dengan Hoana Ngimoi yakni: Hoana Lina, Hoana Huboto, Hoana Mumulati, Hoana Gura, Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Boeng, Hoana Towiliko, Hoana Morodina, dan Hoana Morodai. Sepuluh Hoana itu pun berkumpul menjadi satu wadah yang disebut Hibualamo atau Rumah Besar.

Para peneliti luar menyebut orang Tobelo yang masih menetap—hidup di dalam hutan dengan sebutan Forest Tobelo atau O’Hongana Manyawa, artinya orang yang hidup di dalam hutan.

Syaiful Madjid, Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dalam penelitiannya mengklasifikasi Suku Tobelo menjadi dua, yakni O’Hongana Manyawa (Orang Tobelo yang tinggal di hutan) dan O’Hoherera Manyawa (Orang Tobelo yang tinggal di pesisir). Hal ini, berdasarkan klasifikasi orang Tobelo yang masih tinggal di dalam hutan.

Sedang kata Togutil, katanya, adalah penyebutan orang luar terhadap orang Tobelo yang masih tinggal di dalam hutan. “Sebenarnya, mereka, O’Hongana Manyawa juga tidak menyebut mereka Togutil.” Seiring waktu, penyebutan Togutil pun melekat pada mereka.

Sayangnya, penyebutan kata Togutil berkembang menjadi sebuah stereotip-bermakna konotatif, juga disebut oleh orang Tobelo Luar kepada orang Tobelo Dalam, untuk membedakan diri.

“Tapi, ada kata *O’Tau Gutili* yang artinya rumah obat/ tempat orang Tobelo melakukan proses pengobatan,” katanya.

Syaiful bilang, dari hasil penelitian itu terlihat, *O’Hongana Manyawa* sudah membagi wilayah mereka. Ada hutan produksi, konsumsi, bahkan hutan lindung.

Pembagian itu, katanya, sebelum pemerintah Indonesia memetakan hutan lindung bahkan hutan produksi, seperti taman nasional.

Satu contoh, katanya, Raki Ma’amoko adalah Dusun Raja atau kebun besar yang dikuasai satu marga namun proses panen bisa untuk semua orang. Umumnya, Raki Ma’amoko terdapat sagu (*Metroxylon sagu*) dan pohon langsung (*Lansium domesticum*).

Radios Simanjuntak, Dosen Universitas Halmahera, dalam penelitiannya menyebutkan, *O’Hongana Manyawa* mengenal sistem kesatuan pemukiman dan wilayah. Pertama, kesatuan rumah. Bentuk pemukiman atau tempat tinggal terkecil bagi masyarakat *O’Hongana Manyawa* adalah kesatuan rumah (*O’tau*) yang dihuni satu



keluarga inti yang disebut dengan *O'tau Moi Manyawa* (orang satu rumah). Ia dipimpin seorang kepala keluarga laki-laki.

Kedua, kesatuan pemukiman. *O'Hongana Manyawa* bermukim membentuk suatu kelompok kecil yang disebut dengan *O'Gogere* (pemukiman). Kesatuan pemukiman biasa terdiri dari dua sampai tujuh kesatuan rumah.

Ketiga, kesatuan hutan. *O'Hongana Manyawa*, katanya, membatasi lokasi tinggal mereka dengan kesatuan hutan (*O'Hongana*) sebagai tempat tinggal.

Di Wangongira, kata Radios, juga punya kesatuan hutan, yang harus dihormati oleh warga. Kesatuan ini dibatasi sungai atau bentang alam tertentu. Saat berburu, masyarakat tidak boleh melewati Sungai Magaro yang menjadi pembatas dengan kesatuan hutan masyarakat Kao atau melewati perbukitan yang menjadi batas dengan hutan Ibu (nama wilayah).

"Jika satwa buruan lari melampaui batas wilayah, si pemburu harus merelakan. Pelanggaran terhadap kesatuan hutan ini dapat menyebabkan pertikaian dengan kelompok yang menguasai wilayah hutan yang dimasuki," tulis Radios.

### Pangan dan obat-obatan

Radios, juga peneliti Etnobotani Masyarakat *O'Hongana Manyawa* Sub Etnis Tobelo, di Desa Wangongira, menyebutkan, masyarakat *O'Hongana Manyawa* memanfaatkan 153 spesies dari 54 famili tumbuhan yang dapat dikelompokkan dalam 12 tipe pemanfaatan.

"Tipe pemanfaatan terbesar adalah untuk obat-obatan dan pangan yang mengindikasikan kemandirian masyarakat pada bidang kesehatan dan pangan."

Pemanfaatan bagian tumbuhan terbesar berasal dari buah, diikuti batang dan daun. Untuk tumbuhan terbanyak yang dimanfaatkan adalah pohon, diikuti oleh herba, liana, dan perdu. "Sebagian besar tumbuhan yang dimanfaatkan merupakan tumbuhan liar dari habitat hutan," tulis Radios, dalam penelitiannya.

Dia menuliskan, dari 153 spesies tumbuhan yang berasal dari 54 famili, terbanyak dimanfaatkan oleh *O'Hongana Manyawa* di Wangonira adalah spesies *Arecaceae*, *Poaceae*, *Moraceae*, dan *Fabaceae*.



(Kiri) Orang Tobelo, menampi beras dari panen sendiri. Mereka tanam padi ladang untuk konsumsi sendiri.

Foto: **Faris Bobero**/ Mongabay Indonesia

(Kanan atas) Yohana Mongora dan Lukas Gaza, Komunitas O'Hongana Manyawa atau Togutil yang berasal dari Telaga Lina yang kini bermukim di Desa Wangongira, Tobelo Barat, Halmahera Utara, Maluku Utara.

(Kanan bawah) Sungai di Kali Molulu, Desa Wangongira, Tobelo Barat, Halmahera Utara, Maluku Utara. Menurut Mantan Kepala Desa Wangongira Abdon Ndatti, Ketika ditemui pada November 2020, sebelumnya padi tumbuh banyak di sungai ini, namun, setelah adanya pembangunan bronjong oleh pemerintah, padi yang menjadi identitas dan kalender alam itu pun hilang.

Foto: **Gustam Jambu**

Famili *Arecaceae* disebut juga dengan kerabat palem-paleman dengan batang yang tumbuh tegak ke atas tanpa cabang. Beberapa anggota famili ini setengah merambat misal, rotan. Batang beruas dan tidak memiliki kambium sejati.

Radios bilang, padi ladang yang dipanen masyarakat Wangongira, sekali panen dalam setahun itu, juga ritual doa bersama yang dipusatkan di sekitar mata air Kali Molulu.

Secara kuantitas saat ini, warga Wangongira konsumsi padi lebih tinggi dibandingkan sagu, masa lalu merupakan hal sebaliknya.

“Ini mungkin dipengaruhi inkulturasi atau pencampuran budaya dengan para pendatang yang lebih mengutamakan konsumsi nasi dibandingkan sagu.”

Berdasarkan observasi, sebut Radios, pemerintah juga sering menyalurkan beras murah (*raskin*) kepada masyarakat Desa Wangongira seharga 3 ribu rupiah per kilogram. Selain untuk kebutuhan makanan utama dan ritual, padi juga sumber pakan bagi ternak masyarakat terutama yang diperoleh dari dedak.

Roem Topatimasang, pada catatan kaki, dalam *Orang-Orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Kepulauan Maluku (2004)* menyebutkan, dari beberapa legenda yang dikisahkan narasumber lokal, padi huma di daerah Orang Sahu, diduga berasal dari dataran tinggi Wangongira di tepi Danau Lina.

“Berdasarkan legenda dan fakta bahwa salah satu unsur pakaian adat orang Tobelo penduduk asli Wangongira dan Telaga Lina (bahkan di seluruh wilayah Tobelo) adalah selendang sarung Mandar. Diduga padi huma itu mungkin berasal dari kontak-kontak pertama penduduk asli setempat dengan para pedagang Bugis-Makassar dan Mandar yang membawa beras dan benih padi ke daerah itu sejak abad-15,” tulis Roem.

Maria, *O'Hongana Manyawa*, kini tinggal di pemukiman program pemerintah, di Desa Tutuling, Wasile Timur, Halmahera Timur mengatakan, pada tahun 90-an, menikah dengan pria *O'Hongana Manyawa* bernama Mei. Dalam perkawinan mereka, ada upacara adat untuk pria memberikan beberapa perlengkapan untuk pengantin perempuan. Salah satu alat-alat yang diberikan adalah kain Mandar.

“Saya masih simpan kain Mandar pemberian suami saya. Itu mas kawin kami,” kata Maria. Meski dia tak tahu Mandar itu di daerah mana.

Selain menjaga pangan di Wangongira, di Halmahera bagian utara, Suku Tobelo juga menyebar di Halmahera bagian timur pun membuat *Raki Ma'amoko*—Dusun Raja, yang menjadi sumber pangan mereka.

Menurut Orang Tobelo Dodaga di Wasile, Halmahera Timur, sumber pangan yang disebut Dusun Raja mereka berada di Kali Meja, tepatnya di tengah-tengah daerah transmigrasi antara Satuan Pemukiman 3 dan Satuan Pemukiman 4.

Dimono atau tetua adat Madiki Higiniik bilang, di Kali Meja itu ada dua Raki Ma'amoko, yakni sagu dan buah langsung. "Di situ sumber sagu dan buah langsung. Semua bisa panen bersama di situ," kata Madiki.

Dia bilang, sejak transmigrasi masuk, sebagian besar Dusun Raja Langsung tergusur untuk membangun Satuan Pemukiman 4.

Menurut Kasiang, Tetua Suku Tobelo yang tinggal di Dusun Tukur-Tukur mengatakan, daerah transmigran dulu hutan lebat. Dusun Raja Langsung dan Dusun Raja Sagu adalah sumber kebun makanan yang harus dirawat bersama-sama untuk jaminan hidup sampai anak-cucu. Semua orang, katanya, bisa datang memanen langsung dan sagu untuk pemenuhan kebutuhan di rumah. Mereka, katanya, selalu bergotong-royong menjaga kebersihan Dusun Raja itu.

"Orang dari Maba, Buli bisa datang di Dusun Raja untuk ambil sagu dan langsung," kata Kasiang. Pemilik Dusun Raja Langsa adalah kakek dari almarhum Lopa-lopa, warga sekitar.

Saat ini, di Kali Meja, hanya ada tiga keluarga marga Bidos. Mereka yang masih memanfaatkan sagu untuk sumber pangan sehari-hari.

"Jadi, kalau orang Tobelo dari Teluk Kao dan Orang Dodaga yang ingin ambil sagu di sini, diperbolehkan. Sebab, orangtua mereka dulu membantu buat kebun ini," kata Ikbal, pemuda Kali Meja.

Abdon sudah menyiapkan padi. Beberapa orang tua memasukkan padi ke lesung untuk ditumbuk. Ada Nenek Yohana Mongor bersama seorang ibu bersiap dengan memegang sosiru—alat untuk memisahkan sekam padi dengan beras.

Tak lama, beras mereka masukkan ke bambu kemudian dibakar.

Aroma khas padi yang menjadi nasi pun terasa.

Kala senja, sesajian pun sudah siap. Abdon, para orang tua, dan beberapa orang muda menenteng sesajian menuju Kali Molulu. Di sana, Abdon memimpin doa dan puji-pujian kepada leluhur, menggunakan Bahasa Tobelo.

Roem Topatimasang dalam *Orang-orang Kalah, Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku (2004)* menyebutkan, program pemukiman kembali, mulai dilaksanakan besar-besaran dan sistematis oleh pemerintah Indonesia sejak 1960-an. Pemukiman kembali orang-orang Tobelo Dalam di Halmahera juga didasari stereotip tentang kelompok masyarakat tradisional sebagai suku-suku terasing, terbelakang, primitif, dan animis.

Sejak tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia sudah berupaya merelokasi orang Tobelo dari dalam hutan ke perkampungan, menetap melalui program *resettlement*. Para orang tua, menolak. Mereka menghargai arahan pemerintah, namun tak ingin meninggalkan sejarah dan menjaga sumber air. Dari situlah, para orang tua memilih keluar dari Telaga Lina dan menetap di Wangongira saja.

Syaiful Madjid, Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, dalam penelitiannya mengklasifikasi Suku Tobelo menjadi dua, yakni O'Hongana Manyawa (Orang Tobelo yang tinggal di hutan) dan O'Hoberera Manyawa (Orang Tobelo yang tinggal di pesisir). Kata Togutil, adalah penyebutan orang luar terhadap orang Tobelo yang masih tinggal di dalam hutan.

Radios Simanjuntak, peneliti Etnobotani Masyarakat O'Hongana Manyawa Sub Etnis Tobelo, di Desa Wangongira, menyebutkan, masyarakat O'Hongana Manyawa memanfaatkan 153 spesies dari 54 famili tumbuhan yang dapat dikelompokkan dalam 12 tipe pemanfaatan. Tipe pemanfaatan terbesar untuk obat-obatan dan pangan yang mengindikasikan kemandirian masyarakat pada bidang kesehatan dan pangan.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari website Mongabay Indonesia pada link <https://www.mongabay.co.id/2020/12/19/orang-tobelo-benteng-terakhir-hutan-halmahera/>



# Mengukur dan Memahami Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia Selama Pandemi COVID-19

Oleh **Elizaveta Perova, Daniel Halim & Diana J. Arango**

**T**indakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah berlangsung lama dan menjadi penghambat pembangunan. Bukti yang berkembang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berhubungan erat dengan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Bertambahnya tekanan karena risiko kesehatan dan ketidakpastian ekonomi tampaknya memicu konflik dalam rumah tangga; sementara penyintas (*survivor*) yang terjebak di ruang gerak yang sama dengan pelaku, menghadapi risiko pelecehan yang lebih besar.

Ketika membuat kebijakan, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi melakukan studi sebagai upaya untuk memahami besarnya masalah tersebut dan mengembangkan solusi untuk mencegahnya, darurat COVID-19 menghadirkan tantangan tambahan, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data tanpa membahayakan keselamatan responden? Hal ini menjadi semakin sulit ketika pengumpulan data berubah format menjadi survei jarak jauh, yang memungkinkan kondisi di mana penyintas maupun pelaku berada di ruang yang sama akibat *lockdown* COVID-19.

Setelah 16 Hari Aktivisme Melawan Kekerasan Berbasis Gender (*Gender-Based Violence* atau *GBV*) berlalu, kami mempertimbangkan diterapkannya suatu inovasi dengan menyusun ulang pertanyaan-pertanyaan GBV untuk meminimalkan risiko

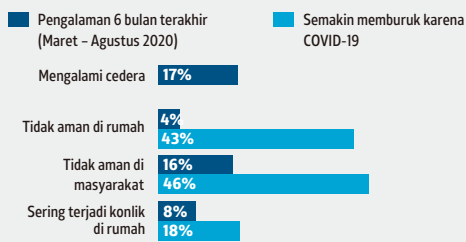
yang mungkin muncul pada saat pengumpulan data survei melalui telepon, dan berbagai hal yang terungkap lewat data tentang kebijakan dan program yang dapat memitigasi GBV.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak secara langsung menanyakan perihal pengalaman GBV. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan tersebut menyajikan serangkaian perumpamaan (*proxy*) dan penggambaran (*vignette*) yang jika digunakan secara bersama-sama bertujuan untuk menangkap pengalaman seseorang saat menjadi korban kekerasan. Pertanyaan yang menggunakan perumpamaan menanyakan tentang pengalaman cedera, perasaan aman, frekuensi pertengkaran. Sedangkan penggambaran menyajikan situasi hipotetis (misalnya suami menyerang istrinya karena tekanan ekonomi) dan bertanya kepada responden apakah situasi tersebut biasa terjadi di komunitas mereka. Tim pengumpul data menuruti pedoman WHO ketika memberikan pelatihan bagi para pencacah (*enumerator*), dan mengembangkan protokol untuk memastikan bahwa responden sendirian saat memulai wawancara. Mereka juga dilatih menyampaikan kode tertentu untuk melewati suatu pertanyaan tertentu, atau mengakhiri wawancara jika responden tidak lagi sendirian selama wawancara.

Tim *East Asia & Pacific Gender Innovation Lab* Bank Dunia menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengumpulkan data dari 866 perempuan di Indonesia pada akhir bulan Agustus 2020. Para responden merupakan bagian dari kegiatan evaluasi dampak yang

## COVID-19 memperburuk persepsi risiko kekerasan yang dialami perempuan di beberapa daerah di Indonesia

Responden perempuan yang melaporkan ....(%)



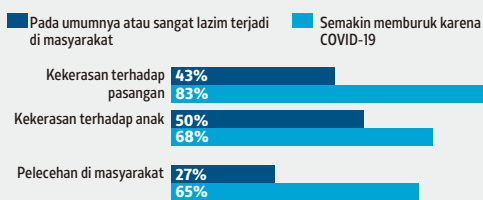
Data di atas diolah dari 866 tanggapan responden perempuan yang dilakukan via telepon, sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan di Indonesia pada akhir Agustus 2020. \* Pertanyaan lanjutan mengenai kondisi yang bertambah buruk karena COVID-19 tidak ditanyakan untuk responden yang mengalami cedera.

Sumber: Lab Inovasi Gender Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia

sedang berlangsung terhadap berbagai program pemerintah Indonesia untuk calon migran. Dengan demikian, survei tersebut tidak bisa mewakili secara nasional. Namun, kekayaan data yang dikumpulkan bersamaan dengan GBV ini, memberikan beberapa temuan berharga tentang faktor-faktor yang terkait dengan paparan GBV yang lebih besar, juga memburuknya situasi yang dirasakan karena pandemi COVID-19.

## Vinyet serupa menunjukkan bahwa risiko kekerasan menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat

Responden perempuan yang melaporkan... (%)



Data diolah dari 860 responden

Sumber: Lab Inovasi Gender Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia

Survei via telepon tersebut juga mengumpulkan informasi yang kaya tentang pekerjaan, unit usaha non-pertanian, pengiriman uang, ketahanan pangan, bantuan sosial, pengetahuan tentang COVID-19, pekerjaan rumah tangga, dan gejala kesehatan. Kami dapat mengaitkan informasi ini dengan data sebelumnya yang dikumpulkan dari rumah tangga yang sama pada tahun 2018. Dengan data yang kaya ini, kami menggunakan pembelajaran mesin (*machine learning*) untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang berperan penting dalam memprediksi pengalaman kekerasan selama enam bulan

terakhir sebelum survei, juga memburuknya situasi yang terjadi. Namun, algoritma pembelajaran mesin tidak memberikan informasi apakah suatu indikator dapat dikaitkan dengan insiden kekerasan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Untuk itu, kami menerapkan analisis regresi terhadap aspek dugaan GBV terkuat yang diidentifikasi melalui pembelajaran mesin.

Analisis ini mengarah kepada dua pengamatan penting yang berpengaruh pada respons kebijakan selama pandemi COVID-19:

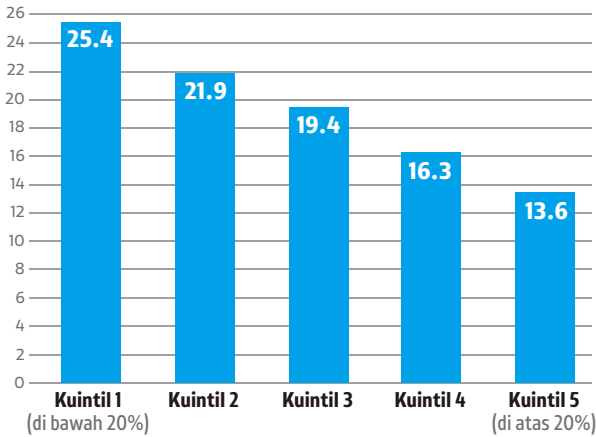
### 1 Perempuan dalam rumah tangga yang terindikasi mengalami tekanan ekonomi, seperti kerawanan pangan, memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan

Hal ini sejalan dengan bukti yang menunjukkan bahwa stres akibat kesulitan ekonomi meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, kerawanan pangan juga dapat menunjukkan bahwa kemiskinan dan norma gender di Indonesia bervariasi sesuai pendapatan rumah tangga. Seperti yang ditunjukkan pada grafik, perempuan dari rumah tangga yang lebih kaya di Indonesia cenderung tidak setuju bahwa pemukulan oleh seorang suami dapat dibenarkan, untuk alasan apapun.

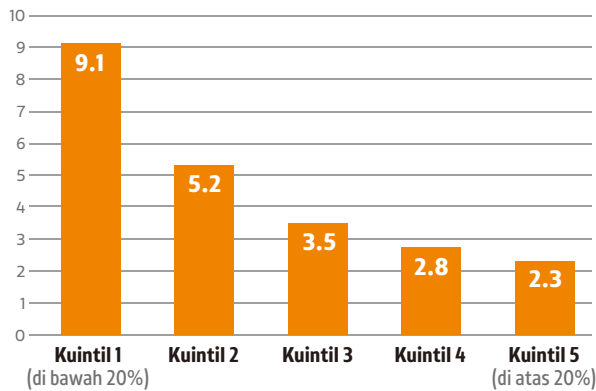
### 2 Dengan memiliki pekerjaan, perempuan terlindungi dari peningkatan kekerasan akibat pandemi COVID-19

Hal ini, sekali lagi, sejalan dengan teori bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan mengurangi risiko kekerasan dalam rumah tangga: seiring dengan lebih baiknya opsi potensial yang dimiliki oleh perempuan di luar pernikahannya, maka situasi di dalam pernikahan diharapkan juga membaik. Perempuan yang lebih berdaya secara ekonomi tidak hanya bergantung kepada suami untuk mendapatkan penghasilan. Mereka mempunyai pilihan untuk meninggalkan hubungan yang berisi kekerasan, sehingga meningkatkan daya tawar mereka dalam menjalani hubungan, dan oleh karenanya mengurangi tindak kekerasan. Menurut data kami, memiliki pekerjaan adalah faktor perlindungan terkuat dari meningkatnya GBV akibat COVID-19.

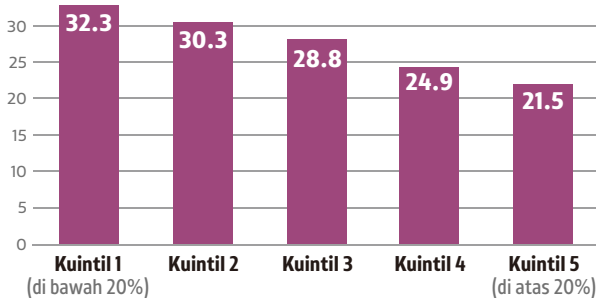
**% Perempuan yang membenarkan pemukulan yang dilakukan oleh suami jika keluar rumah tanpa seizin suami**  
(menurut kuintil pendapatan)



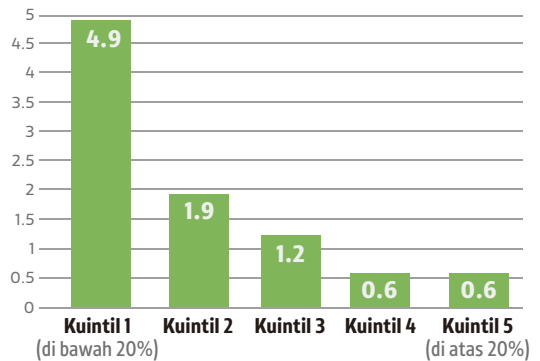
**% Perempuan yang membenarkan pemukulan yang dilakukan oleh suami jika berdebat dengan suami**  
(menurut kuintil pendapatan)



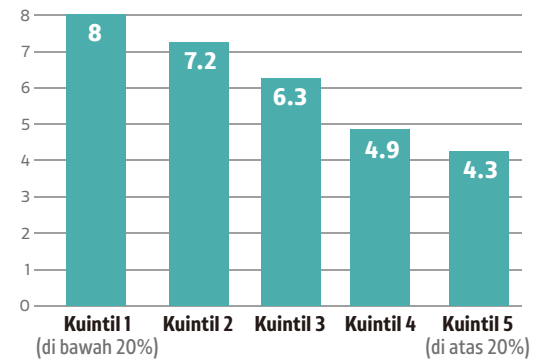
**% Perempuan yang membenarkan pemukulan yang dilakukan oleh suami jika menelantarkan anak**  
(menurut kuintil pendapatan)



**% Perempuan yang membenarkan pemukulan yang dilakukan oleh suami jika menyia-nyiakan makanan**  
(menurut kuintil pendapatan)



**% Perempuan yang membenarkan pemukulan yang dilakukan oleh suami jika menolak berhubungan seksual**  
(menurut kuintil pendapatan)



Sumber: Portal Data Gender Bank Dunia Data untuk Indonesia, 2017

Kedua temuan ini memiliki relevansi langsung dengan respons kebijakan terhadap pandemi COVID-19. Pertama, sejumlah pemerintahan telah meningkatkan bantuan sosial. Selain isu-isu lain yang dapat diatasi melalui tindakan tegas ini, tindakan ini tampak berkontribusi untuk mengurangi risiko GBV. Kedua, karena perempuan memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam hal pengasuhan anak selama pandemi, penting untuk memahami banyaknya manfaat terkait pekerjaan perempuan. Salah satunya adalah mengurangi risiko GBV. Temuan kami menambah argumen yang mendukung tindakan kebijakan yang tegas untuk memastikan bahwa pandemi COVID-19 tidak berdampak negatif pada capaian perempuan di pasar tenaga kerja.

**INFORMASI LEBIH LANJUT**

Artikel ini bersumber dari Blog Bank Dunia dengan tautan: <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/mengukur-dan-memahami-kekerasan-berbasis-gender-di-indonesia-selama-pandemi-covid>



# Berjemur Sembari Santai di Pantai Tablolong, Kupang

Oleh **MUSTAFA IMAN**

**M**

enalani akhir pekan sembari santai di pantai memang menyenangkan, kawan. Jika membicarakan pantai di Indonesia memang tak pernah ada habisnya, maklum, Indonesia adalah negara kepulauan dengan bibir pantai yang terhampar dari ujung timur hingga ujung barat.

Indonesia termasuk negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan total panjang 99.093 kilometer, bahkan berpotensi lebih panjang lagi jika diukur lebih detail.

Salah satu pantai yang memesona di kawasan timur Indonesia adalah Pantai Tablolong. Pantai ini berada di wilayah selatan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atau persisnya berada di wilayah administrasi Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Pantai ini juga dikenal sebagai Pantai panas Tablolong, karena memang cuacanya yang cenderung panas di sana. Pantai ini juga dikenal memiliki pesona terumbu karang yang



Pantai Tablolong, Kupang / Shutterstock

terlihat elok ketika air surut yang tersebar di beberapa lokasi garis pantai.

### Tempat Migrasi Ragam Jenis Ikan

Menukil Indonesia Kaya, pantai yang berjarak 30 kilometer dari Kota Kupang ini diapit oleh Pulau Rote dan Timor. Daya tarik pantai ini juga kerap dijadikan arena olahraga memancing skala nasional hingga internasional saban tahunnya.

Diadakannya acara tersebut bukan tanpa alasan, karena kurang lebih sejauh 10 mil dari garis pantai merupakan jalur migrasi ikan yang cukup ramai dari perairan Laut Timor menuju Laut Sawu.

Beberapa spesies ikan pun kerap bersembunyi di karang-karang sepanjang garis pantai Tablolong. Selain itu, kekayaan biota lautnya juga menjadikan

Tablolong sebagai pantai penghasil rumput laut terbesar di Nusa Tenggara Timur.

Lain itu, dengan memanfaatkan airnya yang jernih serta kaya akan ragam jenis ikan, para nelayan sekitar juga membudidayakan ikan di sekitar pantai.

Di pantai ini juga terdapat Pohon Centigi (*Pempis Acidula*) yang berkembang subur di sekitar bebatuan karang. Pohon ini merupakan sebuah tanaman golongan perdu yang banyak dicari karena keunikannya.

Lantaran suasana pantainya yang hening, pada pagi hari ketika udara sejuk, para pelancong kerap memanfaatkan pantai ini sebagai tempat meditasi guna menenangkan pikiran.

### Akses dan Akomodasi

Jika ingin mengunjungi pantai ini, disarankan agar menggunakan kendaraan pribadi atau sewa, karena belum ada kendaraan umum yang mengantarkan hingga ke lokasi.

Dari pusat Kota Kupang, kawan bisa menuju arah Tenau dengan waktu tempuh sekitar satu sampai 1,5 jam. Anda dapat menyewa kendaraan bertarif 100 ribu rupiah (motor) hingga 300 ribu rupiah (mobil) untuk durasi sehari.

Tentunya, Anda akan dimudahkan dengan banyaknya marka yang akan memandu jalan, hingga sepertinya tak sulit untuk menemukan pantai ini. Dan sesampainya di lokasi, siapkan saja uang 5.000 rupiah untuk harga tiket satu orang, plus 2.500 rupiah untuk tarif parkir kendaraan.

"Walau letaknya pantainya di pelosok, namun untuk parkir dan keamanan sekarang sudah relatif aman," kata Fuad Sauqi, pengunjung asal Kupang pada penulis beberapa waktu lalu.

Jika ingin menginap di *homestay*, seperti ditulis Wisata Tanah Air, bagi turis domestik hanya dikenakan tarif yang cukup terjangkau, sementara untuk turis bule harganya bisa lebih mahal.

Namun menurut beberapa wisatawan, ada juga penginapan sejenis vila yang relatif lebih mahal. Karenanya hanya sedikit wisatawan domestik yang memilih menginap di tempat itu.

Saat ini, seperti wisata pantai pada umumnya, di sekitar pantai juga terdapat warung makanan dan fasilitas penunjang lainnya seperti toilet, kamar ganti serta sarana bermain untuk anak-anak.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Good News From Indonesia (GNFI) dan dapat dibaca pada link <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/10/10/berjemur-sembari-santai-di-pantai-tablolong-kupang>

# Laut Mati di Pulau Rote, Objek Wisata Unik yang Belum Banyak Terjamah

Oleh **MUSTAFA IMAN**

**J**ika mendengar tentang objek wisata laut mati, tentu kita akan langsung berpikir objek itu ada di Yordania, Timur Tengah. Tapi kawan, nyatanya Indonesia juga memiliki laut mati yang berada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.

Yang membedakan keduanya adalah, laut mati di Yordania adalah danau dengan kadar air asin yang cukup tinggi, sehingga membuat orang bisa terapung tanpa menggunakan pelampung dan tak ada ikan yang hidup di dalamnya.

Sementara laut mati di Pulau Rote, adalah teluk yang airnya cenderung payau. Air payau itu adalah perpaduan antara air laut dan air tawar.

Secara geografis, seperti disebut pada laman resmi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, objek wisata laut mati ini, terletak Dusun Sipuk, Desa Sotimori, Kecamatan Landu, Leko. Sotimori merupakan salah satu dari 10 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao.

Dengan bentangan luas sekira 12 kilometer persegi, suasana laut mati ini relatif lebih sunyi ketimbang objek wisata laut lainnya. Objek wisata ini berjarak menuju laut lepas - Laut Sawu - sekitar satu kilometer dari bibir laut mati bagian utara.

Keunikan lainnya dari laut mati di Rote ini seperti dijelaskan Indonesia Kaya adalah pasirnya berasal dari kulit kerang atau keong, serta ikan-ikan yang umumnya hidup di air tawar dapat hidup dan berkembang di kawasan perairan laut mati ini.

## Destinasi Wisata Alternatif di Pulau Rote

Laut Mati di Pulau Rote boleh jadi menjadi salah satu destinasi wisata alternatif selain dua objek wisata pantai yang cukup tenar di pulau itu, yakni pantai Nemberala dan Bo'a. Pantai Nemberala adalah salah satu kawasan wisata ombak yang kesohor bagi para pencinta olahraga selancar di dunia, karena memiliki ombak terbaik ke dua di dunia setelah Hawaii.



Sumber: [https://www.youtube.com/channel/UCyGill67xlt6l01NrUfi\\_Uw](https://www.youtube.com/channel/UCyGill67xlt6l01NrUfi_Uw)



Sumber: <https://www.youtube.com/channel/UCeTYfmQr1FBSnbLd1geKg>

Tak heran, jika ke Pulau Rote kita bakal menemui banyak bule di Kota Ba'a untuk membeli segala kebutuhan makanan untuk persiapan mereka di Pantai Nemberala. Karena memang di pantai itu tak terdapat *supermarket* atau toko penjual makanan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berjarak sekitar enam kilometer dari pusat Kota Ba'a, yang merupakan pusat pemerintahan di Pulau Rote, untuk mencapai laut mati, butuh waktu tempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi jalannya secara umum sudah cukup bagus meski pada beberapa titik terdapat jalanan yang berlubang dan berbatu.

Setibanya di sana, Anda dapat menikmati pemandangan di laut mati ini dengan menggunakan jet ski, serta mengelilingi beberapa pulau kecil yang terletak di tengah laut dengan pesona bukit-bukit yang menjorok ke laut.

Hijaunya hutan bakau dan karang di pesisirnya menambah cerita tersendiri. Di sebelah barat laut mati, ada bukit kecil yang cukup tinggi untuk melihat pemandangan laut mati. Dari bukit itu kawan dapat menikmati pesona matahari terbit.

Saat menyusuri pasir di tepian laut mati sebelum jam 8 pagi, Anda akan mendapati buih-buih putih, di luar jam itu, buihnya akan hilang diterpa angin yang cenderung kering dan kencang. Air laut mati pun bakal mengikuti siklus air laut, saat pasang air akan naik, begitu pun sebaliknya.

### Akses dan Akomodasi

Jika Anda ingin menyambangi Pulau Rote melalui jalur udara, bisa melalui Kota Kupang dari Bandara El-Tari menuju Bandara Lekunik, Rote. Kawan bisa terbang dengan layanan Trans

Nusa dan Susi Air, dengan ongkos sekitar 200-300 ribu rupiah, sekali terbang.

Penerbangan hanya tersedia tiga kali seminggu, yakni pada Senin, Rabu, dan Jumat/Sabtu. Jadwal dapat berubah tergantung situasi dan kondisi cuaca tentunya.

Tapi jika kawan lebih memilih jalur laut, terdapat dua pilihan. Pertama, menggunakan kapal Ferry Roro atau kapal cepat. Ferry Roro bertolak Pelabuhan Bolok, Kupang, yang akan memakan waktu tempuh 3-4 jam hingga tiba di Pelabuhan Pantai Baru, Rote.

Sementara jika menggunakan kapal cepat, kawan bisa mulai dari Pelabuhan Tenau, Kupang, dengan jarak tempuh hanya 1,5-2 jam saja. Tentunya perjalanan laut itu juga tergantu situasi dan gelombang laut.

Dari pelabuhan Pantai Baru, Rote, kawan dapat langsung menuju kota Ba'a yang berjarak sekira 80 kilometer. Waktu tempuh ke kota itu bisa dicapai dalam 1,5-2 jam saja melalui jalur aspal yang relatif mulus.

Seperti mengunjungi pantai-pantai lainnya di Pulau Rote, untuk mengunjungi laut mati ini Anda juga perlu banyak persiapan, karena fasilitas yang tersedia di sana tak seperti pada objek wisata air dan laut lainnya.

Jika hendak menginap di sekitar kawasan laut mati, kawan bisa bertanya kepada penduduk setempat, karena di lokasi tersebut tak terdapat losmen, apalagi Hotel. Umumnya, penduduk setempat menawarkan sewa kamar di rumah mereka dengan bayaran tertentu.

Sepertinya seru nih, kawan. Bolehlah mulai direncanakan untuk menyambanginya.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari Good News From Indonesia (GNFI) dan dapat dibaca pada link [://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/10/11/laut-mati-di-pulau-rote-objek-wisata-unik-yang-belum-banyak-terjamah](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/10/11/laut-mati-di-pulau-rote-objek-wisata-unik-yang-belum-banyak-terjamah)

# Cara-Cara Sederhana Memahami Perspektif Gender dalam Kebijakan Publik

Oleh **NOPITRI WAHYUNI**



Ilustrasi: **Ihsan Djunaed/Verysari BAKTI**





Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di mana pun yang saat ini tengah memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan. Tentunya, 16 hari di penghujung tahun ini akan tetap menjadi momen penting untuk menengok dan merefleksikan kembali isu-isu gender dalam keseharian. Apalagi, pada situasi pandemi yang masih mengungkung kita dengan berbagai persoalan sosial ekonomi di masyarakat saat ini.

Sampai sekarang, pikiran kita mungkin masih mengganjal ketika membaca berita tentang: seorang tenaga kesehatan perempuan yang kesulitan waktu untuk memerah ASI bagi anak balitanya sebab ia harus berjaga penuh di rumah sakit penanganan COVID-19. Atau, seorang anak perempuan yang seharusnya mengikuti belajar daring dengan aman, tetapi harus merasa was-was jikalau orangtuanya bertengkar dan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Bahkan, cerita-cerita tersebut bisa jadi apa yang tengah kita alami atau pada orang-orang terdekat kita. Namun, dari berbagai persoalan sosial ekonomi di atas, masih terdapat celah-celah penanganan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita.

Ketika saya berpikir tentang hal di atas, ternyata memang masih banyak hal yang perlu ditempuh jika saya sedang memosisikan diri sebagai seorang peneliti sosial. Sebelum melangkah untuk memahaminya dengan sederhana, saya baru membaca sebuah tulisan menarik oleh Elizabeth Broderick yang bekerja sebagai seorang komisioner diskriminasi gender di Komisi Hak Asasi Australia. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, ia memaparkan dengan jelas “apa maknanya menerapkan perspektif gender dalam kebijakan publik dan bagaimana terus memperbaikinya?”.

Tulisan tersebut merangkum tiga hal dasar yang dipahami untuk memahami perspektif gender dalam keseharian kita dan kebijakan yang terkait. Dengan berfokus pada *why* (mengapa), *how* (bagaimana) dan *who* (siapa), kita bisa memelajari “pentingnya meletakkan perspektif

gender dalam penerapan kebijakan publik”, “bagaimana kita dapat melakukannya dengan baik”, serta “siapa yang harus bertanggung jawab melakukan hal tersebut”. Tiga hal dasar tersebut amat terkait dengan pendekatan yang saya gunakan sebagai seorang peneliti, yakni “konteks apa yang tengah terjadi dengan perspektif gender”, “kebijakan apa yang diberikan dan apa celahnya”, “apa yang bisa dilakukan dan siapa yang dapat bertanggung jawab melakukan hal tersebut”. Di sini, kita dapat memahaminya secara perlahan.

### Memahami Pentingnya Menerapkan Perspektif Gender Dalam Kebijakan

Terpaparnya berbagai isu dan penerapan kebijakan sosial pada masa pandemi, membuat saya mencari kembali pernyataan dasar mengapa begitu penting untuk menggunakan kaca mata gender dengan posisi ini. Memang apa yang akan terjadi jika sebuah kebijakan tidak mengindahkan perspektif tersebut? Jika ingin menjawab dengan sederhana, saya akan terang-terang menjawab: jelas seluruh kebijakan akan berdampak terhadap kehidupan laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Lalu, mengapa demikian?

“Dengan adanya perbedaan kondisi sosial-ekonomi laki-laki dan perempuan, sebuah kebijakan publik akan berdampak terhadap mereka secara berbeda, baik dampak positif yang diinginkan maupun yang tak diinginkan sama sekali. Hanya dengan menggunakan pendekatan gender-lah, perbedaan tersebut dapat dilihat dan solusinya ditemukan.” (Chappell, Brennan & Rubenstein, 2012).

Pada konteks kebijakan sosial secara lebih khusus, Randles (2018), dalam tulisannya tentang Gender, Keluarga dan Kebijakan Sosial, juga mengatakan bahwa kebijakan akan melanggengkan struktur gender jika tidak melihat adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal sosio-ekonomi maupun pengambilan keputusan, apalagi jika dikaitkan dengan isu disabilitas, suku dan ras, dan lain-lain. Kebijakan yang netral justru akan mengaburkan persoalan kompleks di dalamnya dan tak menjawab dengan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

## Praktik Untuk Menerapkan Perspektif Gender

Untuk menerapkan perspektif gender secara praktis, saya menyukai cara Broderick mengungkapkannya dalam tiga hal: 1) *asking the woman question*: apakah isu perempuan banyak tak dipertimbangkan dalam kebijakan, seperti apakah tidak dilibatkannya, bagaimana bisa diperbaiki, dan apa bedanya ketika hal tersebut diperbaiki; 2) *asking the man question*: pada posisi apa laki-laki pada situasi dan penerapan kebijakan tersebut, apakah situasi ini terjadi kepada seluruh laki-laki atau berdampak secara berbeda pada laki-laki; dan 3) *interrogating institutions and structures*: mempertanyakan celah seperti apa dari penerapan kebijakan secara institusional dan apakah perspektif gender telah diadopsi dalam kebijakan tersebut.

Untuk memahami hal di atas, kita gunakan sebuah konteks begini: ada seorang ibu dengan dua anak balita yang harus berdagang kecil-kecilan di rumah karena suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Memang nampaknya ini terdengar baik. Jika digali lagi, dampak ekonomi dari krisis sebenarnya dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, tetapi dampak sosial lebih banyak dirasakan oleh perempuan yang diharapkan mampu menjalankan peran domestik. Tentunya, ibu tersebut akan sangat berusaha membagi waktunya untuk mengurus suami dan kedua anaknya bersamaan dengan peran baru menjalani usahanya sehingga alokasi waktu untuk mengembangkan usaha tidak berlangsung optimal.

Jika sebuah kebijakan yang ditujukan untuk usaha kecil tidak melihat perbedaan hal tersebut, akan sangat mungkin memunculkan kesenjangan dalam penerapannya. Netral gender pada penerapan kebijakan pada situasi di atas, membuat perempuan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai dukungan, seperti bantuan permodalan, pelatihan usaha ataupun keterlibatan dalam jaringan usaha. Baik sebab keterbatasan waktu, tidak ada akses informasi maupun persyaratan administrasi yang masih menyulitkan dari segi kualifikasi usaha dan hal-hal. Pada akhirnya, dukungan tersebut tak banyak sampai kepada pelaku usaha perempuan

yang semakin memperlambat upaya pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

Ini masih satu isu. Kita pun bisa menemukan isu kebijakan lain dengan banyak menggali tiga pertanyaan dasar di atas menggunakan perspektif gender dan bagaimana implikasinya terhadap upaya mengoptimalkan kesempatan perempuan dan laki-laki dan menekan kesenjangan dan diskriminasi berdasarkan gender.

## Pihak-pihak yang Dilibatkan dan Kesimpulan

Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perspektif gender diterapkan dalam kebijakan publik? Dari segi pemangku kepentingan, tentu peran-peran berbagai aktor, baik pemerintah, swasta, akademisi maupun lembaga non-pemerintah memiliki peran yang signifikan. Namun, secara fundamental, jawaban yang paling sederhana adalah setiap dari kita bertanggung jawab untuk memastikannya. Membayangkan setiap dari kita di setiap lembaga apapun memiliki kesadaran gender dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan akan menjadi komitmen yang tulus, baik secara individual maupun institusional, untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Momen 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun ini amatlah penting untuk melihat kembali sekeliling kita secara sosial dan ekonomi. Bagaimana pandemi berdampak terhadap ayah dan ibu, anak maupun saudara perempuan dan laki-laki, teman perempuan dan laki-laki kita, secara berbeda. Apakah kebijakan melihat perbedaan tersebut dan jika tidak, apa yang bisa diperbaiki lagi dan lagi. Pertanyaan dasar ini sangatlah sederhana untuk memahami penerapan perspektif gender dan benar-benar berusaha menghidupkannya dalam melihat kebijakan yang ada saat ini.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Peneliti Bidang Sosial pada The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research  
Artikel ini bersumber dari: <https://www.theindonesianinstitute.com/cara-cara-sederhana-memahami-perspektif-gender-dalam-kebijakan-publik>

# Meningkatkan Mutu Pendidikan Sejak dalam Perencanaan

Oleh **HALIA ASRIYANI**

“Anak-anak di kampung ini jarang masuk sekolah. Kalau kami ketemu mereka di luar, mereka bilang malas pergi sekolah. Saat kami tanya mama sama bapak bilang apa, mereka jawab kalau dorang bilang kasi tinggal saja sudah! Di sini kami sedih. Kami menganggap kalau kesadaran orang tua memang juga kurang. Padahal pendidikan itu penting untuk anak-anak kita,” ungkap Herlina S. Silubun, Guru SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. “Anak-anak itu wajib sekolah. Kami minta Bapak Kepala Kampung buatkan peraturan soal ini, bisakah tidak?” tanya Bu Herlina. “Kampung siap demi meningkatkan sumber daya manusia di kampung,” jawab Yunus Askoman, Kepala Kampung Wawcesau.

**D**

emikianlah sekilas diskusi yang berlangsung dalam forum musyawarah kampung di Kampung Wawcesau, Distrik Akat, Kabupaten Asmat Provinsi Papua pada Maret 2020 lalu. Proses diskusi ini terjadi antara pihak kampung dengan sekolah dasar yang ada di wilayah tersebut. Kehadiran sekolah pada forum musyawarah kampung ini adalah untuk menyusun perencanaan yang bersinergi antara kampung dan sekolah.



Foto: Dok. LANDASAN II/Yayasan BaKTI



## Mengapa Kampung dan Sekolah Perlu Bersinergi?

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan kampung dan sekolah dapat diindikasikan oleh beberapa kenyataan seperti masih rendahnya peran-serta dalam pertemuan rapat kampung dan sekolah yang membicarakan penyusunan program pembangunan kampung dan sekolah. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terdapat tiga komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan yaitu manajemen (kepala sekolah), kegiatan belajar mengajar (guru dan siswa) dan peran serta masyarakat (komite sekolah, wali murid dan *stakeholder* lainnya).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan strategi dengan adanya satu kampung dan sekolah sebagai institusi penggerak yang dapat mendesiminasikan sinergi perencanaan kampung dan sekolah. Perlu membangun situasi dan kondisi yang nyaman supaya semua pihak memiliki kesempatan dan bisa secara sungguh-sungguh dapat berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan baik kampung maupun sekolah. Dengan bersinergi, akan memberikan hasil yang lebih maksimal dibanding dikerjakan secara sendiri-sendiri, agar tantangan yang dihadapi oleh sekolah dan

(Kiri) Tim Perencanaan Sekolah sedang memaparkan permasalahan pendidikan dalam Musyawarah Kampung Sokoggo, Kab. Boven Digoel

Foto: **Dok. KOMPAK-LANDASAN II/Yayasan BaKTI**

kampung dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Bila sinergi perencanaan pada tingkat kampung dan sekolah terjadi, maka peningkatan kualitas dan akses layanan dasar bidang pendidikan akan lebih optimal capaiannya, dan efisien dalam penggunaan sumber daya sebab masing-masing pihak mengambil peran dalam upaya untuk mencapainya. Hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat secara inklusif dan dengan demikian peningkatan mutu pendidikan dapat berlangsung secara efektif. Disamping itu, ketepatan penggunaan dana kampung dan sekolah dalam pemenuhan hak-hak warga akan terwujud.

## Bagaimana Sinergi Perencanaan Kampung dan Sekolah Berjalan?

Perencanaan sekolah sendiri terdiri atas Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Secara ringkas, proses perencanaan sekolah diawali dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan melakukan pembinaan, bimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan



1 Yunus Askoman, Kepala Kampung Wawcesau dalam forum musyawarah Kampung Wawcesau 2 Pemaparan Tim Perencanaan Sekolah dalam forum Musyawarah Kampung Wawcesau, Kab. Asmat  
4 Musyawarah Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel  
3 Herlina S. Silubun memimpin proses perencanaan sekolah di SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam  
Foto: **Dok. KOMPAK-LANDASAN Fase II/Yayasan BaKTI**

pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. Tim ini juga bertugas melakukan pendalaman/orientasi mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan dan penyusunan rencana sekolah baik jangka menengah maupun rencana tahunan. Bagian inilah yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah.

Dalam penyusunan rencana ini mula-mula disiapkan data sekolah yang akurat dan valid untuk digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan sekolah. Selanjutnya berdasarkan pencermatan dan analisa terhadap data tersebut kondisi sekolah secara keseluruhan dapat digambarkan dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi sekolah bisa diidentifikasi.

Setelah masalah-masalah teridentifikasi, maka perlu mencari penyebab sebenarnya, agar tindakan yang efektif dapat direncanakan untuk mengatasi dan menghindari masalah tersebut berulang. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan penyebab masalah, sebelum lebih lanjut dalam penyusunan rencana kegiatan untuk

mengatasi masalah-masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai perlu digambarkan atau ditetapkan secara spesifik dan terukur sehingga jelas kondisi seperti apa yang diinginkan nantinya. Tahap berikutnya adalah menggagas kegiatan yang perlu dilakukan. Dengan menggunakan gambaran tentang kondisi sekolah yang diharapkan dan hasil analisa penyebab masalah pada tahap sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan dapat direncanakan.

Sampai di sini, proses sinergi antara sekolah dan kampung pun dapat berlangsung. Dengan mengatur waktu pelaksanaan perencanaan kampung dapat berjalan paralel dengan perencanaan sekolah, maka forum musyawarah kampung pun dapat menjadi titik sinergi perencanaan antara kampung dan sekolah. Dalam forum musyawarah kampung, tim perencanaan sekolah akan hadir untuk memaparkan permasalahan yang mereka hadapi. Begitu pula kampung memaparkan permasalahan yang sudah mereka identifikasi. Tahap ini sekaligus mengklarifikasi masalah dan menyepakati solusi secara bersama-sama.

### Apa yang Dihasilkan dari Sinergi Perencanaan Kampung dan Sekolah?

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sekolah pada musyawarah kampung

akan ditanggapi oleh kampung, begitu pula sebaliknya. Harapan dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan pendidikan di wilayah mereka dapat ditangkap dengan hadirnya sekolah dalam musyawarah kampung. Begitu pula harapan dan kebutuhan dari sekolah yang diharapkan oleh pemerintah kampung. Diskusi antara pihak kampung dan sekolah mengenai program apa yang dapat dilakukan secara bersinergi ke depannya pun terjadi.

Di tahap ini pembagian peran antara kampung dengan sekolah dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada pun akan terlihat. Seperti yang terjadi di Kampung Wawcesau, Kabupaten Asmat. Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya menjadi masalah yang dihadapi sekolah. Keterbatasan wewenang sekolah untuk membuat peraturan mengenai wajib sekolah pun disambut oleh kampung. Pembuatan peraturan kampung mengenai wajib sekolah pun menjadi program kerja dari kampung.

Lain lagi permasalahan yang terjadi di Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel. Sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Pengadaan guru honorer terbentur tingginya biaya akomodasi yang tidak dapat ditanggung oleh sekolah. Akhirnya kampung dan sekolah sepakat untuk bekerja sama. Sekolah akan menanggung biaya honor guru dan kampung akan menanggung biaya akomodasinya. Demikianlah contoh pembagian peran yang dapat terjadi antara kampung dan sekolah melalui perencanaan yang bersinergi.

Setelah melewati musyawarah kampung, usulan yang ada pun dituangkan dalam bentuk kegiatan. Pada tahap ini tim menyusun rencana program atau kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi berdasarkan gagasan-gagasan kegiatan yang sudah dibuat. Setelah rencana program sekolah tersusun, maka program yang telah disepakati dimasukkan ke dalam rumusan matriks Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Hal yang sama pun terjadi di kampung, program-program yang telah disusun secara bersinergi dengan sekolah akan dituangkan

dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kampung yang selanjutnya akan dipaparkan kembali dalam forum musyawarah kampung yang menghadirkan sekolah.

### **Program Sinergi Perencanaan KOMPAK-LANDASAN Fase II**

Sinergi perencanaan adalah program yang sejak tahun 2019 telah dibangun dan dikerjakan oleh Program KOMPAK-LANDASAN Fase II. Sinergi perencanaan ini berlangsung antara kampung dengan unit layanan dasar. Tidak hanya antara kampung dengan sekolah, melainkan juga antara kampung dengan Puskesmas terkait pelayanan kesehatan. Dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar berkualitas, program ini dijalankan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Wilayah tersebut adalah kabupaten Jayapura, Nabire, Asmat, Boven Digoel, Manokwari Selatan, Fakfak, Sorong dan Kaimana. Kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan mendampingi proses perencanaan di tingkat kampung yang dilakukan secara bersinergi dengan sekolah maupun Puskesmas. Pendampingan sinergi perencanaan ini telah dikerjakan di 12 kampung dan 10 sekolah di Papua dan Papua Barat. Pendampingan tersebut pun telah menghasilkan dokumen perencanaan kampung dan sekolah yang disusun dengan saling bersinergi.

Kolaborasi kampung dan sekolah untuk meningkatkan layanan dasar pendidikan yang tampak melalui sinergi perencanaan ini adalah hal baru bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat. Melalui banyak pengalaman dalam membangun sinergi perencanaan, tampak bahwa memang dibutuhkan kolaborasi yang terinstitusional antara kampung dan unit layanan dasar untuk memecahkan masalah bersama. Tim KOMPAK-LANDASAN Fase II akan terus mengawal jalannya sinergi perencanaan kampung dan unit layanan dasar yang masih akan diperkenalkan di kampung lainnya untuk mewujudkan peningkatan akses layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat Papua dan Papua Barat.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

---

# Menuju Kemandirian Komunitas dalam Pendampingan Pasien TBC Resistan Obat di 4 Wilayah di Indonesia

Oleh **AMADEUS REMBRANDT**

**B**erdasarkan laporan badan kesehatan dunia (WHO) tahun 2020, Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua setelah India dengan estimasi kasus 845 ribu di tahun 2019. Untuk kasus TBC Resistan Obat (TBC RO), Indonesia merupakan 1 dari 10 negara yang berkontribusi terhadap 77% kesenjangan secara global untuk estimasi kasus TBC RO dengan estimasi kasus sebanyak 24 ribu. Dari 24 ribu kasus ini, hanya 11.463 (48%) yang terkonfirmasi sebagai kasus TBC RO dan hanya 48% pasien TBC RO yang memulai pengobatan TBC lini kedua. Selain rendahnya cakupan angka pasien TBC RO yang mulai pengobatan, cakupan angka keberhasilan pengobatan TB RO juga masih rendah, yaitu dengan 45% (2.997) pasien TB RO yang mulai pengobatan TB lini kedua di tahun 2017 berhasil menyelesaikan pengobatan atau dinyatakan sembuh.

Rendahnya cakupan angka pasien TBC RO yang mulai pengobatan dan capaian angka keberhasilan pengobatan TBC RO, berpotensi untuk meningkatkan penularan TBC RO, menimbulkan resistansi pengobatan yang lebih kompleks dan meningkatkan angka kematian.

Dalam rangka mendukung pencapaian Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia, Yayasan KNCV Indonesia (YKI) melalui dukungan pendanaan dari USAID akan mengimplementasikan proyek MANDIRI-TB (Mobilisasi Jejaring untuk Kemandirian Melawan TBC) di empat kota, yaitu Medan (Sumatera Utara), Jakarta Utara (DKI Jakarta), Surabaya

(Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil dan organisasi pasien dalam melakukan advokasi sehingga kegiatan pendampingan pasien TBC Resistan Obat yang dilakukan oleh komunitas dapat dilakukan secara mandiri, baik oleh pendanaan dari pemerintah (APBD) maupun swasta (CSR dan filantropi). Selain itu Mandiri TB bertujuan untuk memperkuat kapasitas anggota organisasi masyarakat sipil dan organisasi pasien dalam melakukan konseling perubahan perilaku dalam proses pendampingan pasien TBC RO yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan TB yang berkualitas dan berpusat pada pasien.

“Dalam implementasinya, proyek MANDIRI-TB akan melakukan dua strategi utama yaitu melalui pendekatan multi sektoral untuk meningkatkan komitmen pemda dan sektor swasta terkait anggaran kegiatan TBC dan meningkatkan akses layanan TBC RO yang berkualitas dan berpusat pada komunitas,” terang dr. Jhon Sugiharto, MPH, Direktur Yayasan KNCV Indonesia.

Proyek ini nantinya juga turut berkontribusi dalam perjalanan menuju kemandirian program penanggulangan TBC melalui pemberdayaan jejaring pemangku kepentingan menuju eliminasi TBC di Indonesia. Pemangku kepentingan yang dimaksud termasuk pemerintah daerah, penyedia layanan kesehatan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Selain itu komunitas sebagai sektor kunci juga menjadi mitra strategis dalam pelaksanaannya.



Foto-foto: Dok. Yayasan KNCV Indonesia

MANDIRI-TB akan diimplementasikan hingga September 2022. Proyek ini menargetkan 100% pasien TBC RO di wilayah intervensi dapat memulai pengobatan dan >80% pasien TBC RO di wilayah intervensi dapat menyelesaikan pengobatan.

“Eliminasi TBC menjadi tanggung jawab semua pihak, bahkan lintas sektor di luar sektor kesehatan serta komunitas. Peran komunitas sangat penting, bahkan hal ini sejalan dengan strategi penanggulangan TBC Nasional 2020-2024 dimana pelibatan komunitas penting dilakukan terutama dalam mendukung upaya diagnosis dan pengobatan untuk mencapai peningkatan angka keberhasilan pengobatan,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, M. Epid, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dalam sambutannya saat membuka acara Kick Off MANDIRI-TB 7 Januari 2021.

Program Mandiri TB diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan akses pendanaan kegiatan dukungan pasien TBC RO baik yang bersumber dari pemerintah lokal maupun dari korporat melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, program Mandiri TB juga diharapkan berperan dalam memfasilitasi organisasi masyarakat lokal dan organisasi pasien sebagai mitra implementasi untuk memberikan dukungan

psikososial yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasien TBC RO.

Program MANDIRI-TB diharapkan dapat memberikan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk alokasi pendanaan dari pemerintah lokal dan mempertahankan dukungan dan keikutsertaan sektor korporasi melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu, juga memfasilitasi organisasi masyarakat lokal dan organisasi pasien sebagai mitra implementasi untuk memastikan akses layanan diagnostik TBC, pengobatan TBC, dan dukungan psikososial yang berkualitas bagi pasien TBC RO.

### Tentang Yayasan KNCV Indonesia

YKI adalah organisasi nonprofit yang didirikan pada tanggal 15 Desember 2016 yang difasilitasi oleh KNCV Tuberculosis Foundation. YKI didirikan dengan harapan untuk menjadi organisasi lokal yang kuat dan mandiri untuk penanggulangan TBC dan masalah kesehatan lainnya di Indonesia.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan YKI kunjungi [www.yki4tbc.org](http://www.yki4tbc.org) atau mengirimkan email ke Amadeus Rembrandt, Communications Coordinator Yayasan KNCV Indonesia [amadeus.rembrandt@yki4tbc.org](mailto:amadeus.rembrandt@yki4tbc.org)





Foto: Dok. KIAT GURU

# Saya Sunardi Petani Sawit Tapi Saya Bisa

Oleh **NOFI ARIYANTO**



Sunardi (48 Tahun) adalah seorang petani sawit yang tinggal di Desa Tempoak Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Pada Bulan Desember tahun 2016 adalah awal Sunardi menjadi Kader Desa KIAT Guru terpilih secara aklamasi oleh masyarakat Tempoak.

Sejak Bulan Januari 2017 Sunardi mulai ikut terlibat dalam memfasilitasi pertemuan pada Program KIAT Guru dengan ikhlas dan tanpa mengharap imbalan, awal memfasilitasi Sunardi terkadang terlihat kurang percaya diri, namun hal

itu tidak menyurutkan Sunardi untuk tetap menjembatani antara guru dan masyarakat di desanya. Pada awalnya fasilitator masyarakat memberikan kesempatan Sunardi untuk memfasilitasi pertemuan dengan porsi 30% Sunardi sebagai kader desa dan 70% fasilitator masyarakat. Di waktu selesai memfasilitasi, fasilitator masyarakat yang bertugas di desanya mengajak untuk merefleksikan pertemuan yang sudah dijalankannya dengan harapan Sunardi bisa belajar dari praktik baik dan tantangan pada setiap pertemuan yang dilaksanakannya.



Foto: Abdurrahman Doge/TNP2K

Disela-sela kesibukannya bertani sawit, Sunardi membaca “Buku Panduan Memfasilitasi Program KIAT Guru “ yang diberikan fasilitator masyarakat kepadanya dan tidak jarang Sunardi menandai buku panduan tersebut jika dirasa ada yang tidak paham dan menanyakan ke fasilitator masyarakat di waktu ada jadwal kunjungan ke desanya. Di usianya yang terbilang tidak muda lagi semangat Sunardi sangat tinggi untuk belajar sesuatu yang baru, hingga pada suatu hari Sunardi dapat memfasilitasi pertemuan dengan porsi lebih besar dari fasilitator masyarakat dan pada Pertemuan Rutin Bulanan ke-2 di bulan April 2019. Sunardi sudah dapat memfasilitasi pertemuan dengan mandiri dari menyiapkan pertemuan, pelaksanaan dan pelaporan pertemuan.

Pada tahun 2019 Program KIAT Guru (Kinerja dan Akuntabilitas Guru) menjadi program perluasan dan pada saat itu membutuhkan beberapa fasilitator masyarakat lokal. Berbekal Ijasah SMA, tidak menyurutkan niat Sunardi untuk mengikuti seleksi tersebut. Ada beberapa kriteria pada seleksi itu salah-satunya adalah mempraktikan teknik memfasilitasi dan wawancara. Setelah menjalani beberapa tes dan dapat meyakinkan Tim Panelis Seleksi (Bappeda, Dinas Pendidikan dan Tim KIAT Guru) Sunardi terpilih menjadi salah-satu dari fasilitator

masyarakat Lokal di Kabupaten Landak. Walaupun sudah menjadi fasilitator masyarakat lokal Sunardi tidak berhenti untuk terus belajar. Bahkan Sunardi sudah menguasai dan mahir menggunakan *Microsoft Word* karena ketekunannya untuk belajar dan membaca.

“Untuk memajukan hasil belajar anak-anak di desa sangat terpencil tidak membutuhkan orang yang pendidikannya tinggi tetapi yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran dari berbagai pihak untuk bergotong royong” Ucap Sunardi Sebelum terjun ke lapangan. Ucapan itu terbukti dari 5 desa dampungannya terbentuklah janji bersama antara masyarakat dengan guru dan munculnya kader desa dan kelompok penggunaan.

Setelah kontrak fasilitator masyarakat lokal berakhir, Sunardi kembali ke desanya menjadi Petani sawit dan memfasilitasi pertemuan Program KIAT Guru di sela-sela kesibukannya. Harapan besar Sunardi adalah semua masyarakat desa dapat berkontribusi dan bergotong royong untuk memajukan pendidikan di desanya karena tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi melalui email  
[nofariyanto.pls02@gmail.com](mailto:nofariyanto.pls02@gmail.com)



## DISKUSI ONLINE LIVE DI **Instagram Story @infobakti**



### **MONOLOG LUNA: PAPUA**

Monolog Luna: Papua “Tentang perjalanan pulang, tentang Ifar Gunung tempat sa lahir. Tentang sekolah dengan beranda kelas terbuka menghadap ke lapangan luas di Sentani dan lautan Pasifik di teluk Humboldt. Tentang perjalanan mengumpulkan *noken* dari *La Pago, Mee Pago, Animha, Saireri* dan *Tabi*. Juga tentang saya yang sekarang: *mama*”.  
*Wa Wa Wa*

Luna Vidya - 2020



### **BUMDES PENGELOLAAN AIR LENDANG NANGKA**

BUMDES Lentera Desa Lendang Nangka di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengelola Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) ‘Asih Tigasah’ dengan tarif relatif kecil, yakni hanya 200 rupiah untuk 1 meter kubik air.

Hingga Mei 2020, pelanggannya mencapai 981 kepala keluarga dari 6 dusun di Desa Lendang Nangka. 45 persen keuntungan PAMDES digunakan untuk pemeliharaan mesjid.



### **PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK - PERCEPATAN YANG TAK BISA DITUNDA**

1 dari 9 anak perempuan di Indonesia telah menikah sebelum usianya mencapai 18 tahun (Data Susenas, 2016)

Anak yang jumlahnya 79,55 juta atau 30,1% dari total penduduk Indonesia (Proyeksi BPS, 2018) sebagai generasi penerus bangsa harus dipenuhi hak-haknya termasuk perlindungan dari praktik perkawinan anak.

Diskusi bersama Unicef Indonesia mengupas tuntas upaya bersama bersama dari berbagai pihak untuk memutus mata rantai perkawinan anak untuk memastikan anak-anak terlindungi hak-haknya bukan hanya pada level nasional tapi hingga ke masyarakat.

Salah satunya melibatkan para anak muda bersama-sama berkontribusi menyuarakan pendapat, menjadi agen perubahan menjadi U-Reporter yang menceritakan praktik-praktik baik, inspirasi, pembelajaran dari anak muda untuk melindungi hak-hak anak sebagai upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

## Artikel

### Webinar MAMPU Membahas Perempuan di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali perempuan dan anak perempuan. Bahkan, mereka lebih rentan dari kelompok lainnya. Melalui Webinar Series MAMPU "Perempuan dan Pandemi", cerita-cerita mengenai dampak pandemi terhadap perempuan dan perjuangan mereka dalam mengatasi dampak pandemi diungkap dan didiskusikan dalam tiga sesi webinar.

Dalam sambutannya, Kate Shanahan, Team Leader Program MAMPU menyatakan keinginannya agar webinar ini dapat menjadi wadah bagi perempuan di akar rumput dan lembaga non-pemerintah untuk berbagi perspektif dan pengalaman mereka terkait pandemi. Dan pengalaman mereka dapat langsung didengar oleh para pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kate Shanahan juga menambahkan, "MAMPU bersama mitranya selama pandemi terus melakukan kegiatan intervensi di lapangan dengan tetap memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui pendekatan perspektif gender dan inklusif. Mitra MAMPU menguatkan pengorganisasian kelompok perempuan di desa, membangun ketahanan di komunitas dan melibatkan multi pihak dalam penanganan Covid-19."

<https://www.batukarinfo.com/node/35598>

## Referensi

### Memahami Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan Dalam Program LANDASAN



Program KOMPAK-LANDASAN Fase II adalah program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat di tanah Papua terhadap layanan dasar yang berkualitas. Dalam periode implementasi program tahun 2017-2018, upaya telah difokuskan untuk peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Namun, tantangan permasalahan layanan dasar di tanah Papua dirasa belum cukup tertangani hanya dari peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung.

Buku "Memahami Sinergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan Dalam Program LANDASAN" akan membantu Anda memahami penerapan sinergi perencanaan secara mendalam mengenai pengertian dan konsep dari sinergi perencanaan yang dikembangkan dalam program LANDASAN-

KOMPAK, sehingga lebih ditujukan untuk memberi pemahaman umum atas konsep sinergi perencanaan kampung dan unit layanan.

<https://www.batukarinfo.com/node/35600>

## Peluang

### Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA)

*This non-degree program is for teachers of English or Indonesian-as-a-foreign language to teach Indonesian for one academic year at an American university. This is an opportunity to refine their teaching skills, increase their English-language proficiency, and extend their knowledge of the cultures and customs of the United States. In turn, it is hoped that their teaching will strengthen the instruction of foreign languages at US colleges and universities. Participants will teach up to 20 hours per week and enroll in at least two American Studies and Teaching of English as a Second Language (TESL) methodology classes per semester.*

**For more information:** <https://www.batukarinfo.com/node/35604>

## Berita Terbaru

### Pembelajaran dari BANGGA Papua untuk Indonesia

BANGGA Papua merupakan program khusus dari pemerintah provinsi untuk orang asli Papua, dengan memanfaatkan dana otonomi khusus (otsus). Program ini bertujuan agar penduduk asli dapat mengatasi permasalahan gizi buruk serta meningkatkan kesehatan anak-anaknya. Per Desember 2019, pelaksanaan program BANGGA Papua sudah diujicobakan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Lanny Jaya. Total dana yang disalurkan mencapai Rp 121,5 miliar kepada 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali. BANGGA Papua diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menjalankan perlindungan sosial secara menyeluruh pada 2030. Ada beberapa tantangan utama di lapangan, yaitu pengelolaan operasional, ketersediaan data kependudukan, teknis penyalurannya, dan pengawasan.

<https://www.batukarinfo.com/node/35609>